



**ORASI PENGUKUHAN PROFESOR RISET
BIDANG HUBUNGAN INTERNASIONAL**

**POLITIK LUAR NEGERI
ERA REFORMASI:
KEBANGKITAN INDONESIA
SEBAGAI NEGARA KEKUATAN MENENGAH
DALAM PERCATURAN
REGIONAL DAN GLOBAL**



**OLEH:
GANEWATI WURYANDARI**

**BADAN RISET DAN INOVASI NASIONAL
JAKARTA, 10 MARET 2022**

Epub ini tidak diperjualbelikan.

**POLITIK LUAR NEGERI ERA REFORMASI:
KEBANGKITAN INDONESIA SEBAGAI
NEGARA KEKUATAN MENENGAH
DALAM PERCATURAN
REGIONAL DAN GLOBAL**

Buku ini tidak diperjualbelikan.

Dilarang mereproduksi atau memperbanyak seluruh atau sebagian dari buku ini dalam bentuk atau cara apa pun tanpa izin tertulis dari penerbit.

© Hak cipta dilindungi oleh Undang-Undang No. 28 Tahun 2014

All Rights Reserved

Buku ini tidak diperjualbelikan.



**ORASI PENGUKUHAN PROFESOR RISET
BIDANG HUBUNGAN INTERNASIONAL**

**POLITIK LUAR NEGERI ERA REFORMASI:
KEBANGKITAN INDONESIA SEBAGAI
NEGARA KEKUATAN MENENGAH
DALAM PERCATURAN
REGIONAL DAN GLOBAL**

OLEH:

GANEWATI WURYANDARI

**BADAN RISET DAN INOVASI NASIONAL
JAKARTA, 10 MARET 2022**

Buku ini tidak diperjualbelikan.

© 2022 Badan Riset dan Inovasi Nasional
Pusat Riset Politik

Katalog dalam Terbitan (KDT)

Politik Luar Negeri Era Reformasi: Kebangkitan Indonesia sebagai Negara Kekuatan Menengah dalam Percaturan Regional dan Global /Ganewati Wuryandari. Jakarta: Penerbit BRIN, 2022.

xi + 69 hlm.; 14,8 x 21 cm

ISBN 978-623-7425-55-7 (cetak)
978-623-7425-56-4 (e-book)




- | | |
|----------------------------------|--------------------------|
| 1. Politik luar negeri Indonesia | 2. Era Reformasi |
| 3. Percaturan Politik | 4. Kebangkitan Indonesia |

327.598

Copy editor : Apriwi Zulfitri dan Anggy Denok Sukmawati
Proofreader : Mayasuri Presilla
Penata Isi : Rahma Hilma Taslima
Desainer Sampul : Imam Setyawan

Cetakan : Maret 2022



Diterbitkan oleh:
Penerbit BRIN
Direktorat Repositori, Multimedia, dan Penerbitan Ilmiah
Gedung BJ Habibie, Jl. M.H. Thamrin No.8,
Kb. Sirih, Kec. Menteng, Kota Jakarta Pusat,
Daerah Khusus Ibukota Jakarta 10340
Whatsapp: 0811-8612-369
E-mail: penerbit@brin.go.id
Website: penerbit.brin.go.id
 PenerbitBRIN
 Penerbit_BRIN
 penerbit_brin

Buku ini tidak diperjualbelikan.

BIODATA RINGKAS



Ganewati Wuryandari lahir di Magelang, pada 30 November 1964 adalah anak ke tujuh dari enam bersaudara. Terlahir dari pasangan Bapak H.W. Poerwowasito dan Ibu Hj. Marjatoen. Menikah dengan Drs. Bambang Triharyono, M.B.A. dan dikaruniai tiga orang anak, yaitu Maulana Permana Ajie, dan kembar - Saffira Annisa Bening dan Nabila Annisa Harum.

Berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 3/M Tahun 2022 tanggal 19 Januari 2022 yang bersangkutan diangkat sebagai Peneliti Utama terhitung mulai 1 Oktober 2021.

Berdasarkan Keputusan Kepala Badan Riset dan Inovasi Nasional Nomor 54/HK/2022 tanggal 12 Februari 2022 tentang Pembentukan Majelis Pengukuhan Profesor Riset, yang bersangkutan dapat melakukan pidato pengukuhan Profesor Riset.

Menamatkan Sekolah Dasar Kemirirejo II tahun 1975, Sekolah Menengah Pertama Negeri II tahun 1979 dan Sekolah Menengah Atas Negeri I tahun 1982 di Magelang. Memperoleh gelar Sarjana Jurusan Ilmu Pemerintahan dari Universitas Gadjah Mada tahun 1987, gelar Magister Master of Art in International Relations, Department of Politics, dari Monash University tahun 1994, dan gelar Doctor of Philosophy Asian Studies dari the University of Western Australia tahun 2006.

Mulai bekerja di Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia sejak tahun 1989. Pernah menjabat sebagai Plt. Kepala Pusat Riset Kewilayahan, BRIN (1 September–8 November 2021), Kepala Pusat Penelitian Kewilayahan, LIPI (25 April 2016–31

Agustus 2021), Plt. Kepala Bidang Pengelolaan dan Diseminasi Hasil Penelitian Pusat Penelitian Politik, LIPI (2014–2015), Kepala Bidang Tata Operasional Pusat Penelitian Politik, LIPI (2008–2014), dan Staf Ahli DPD RI untuk penyusunan naskah akademik dan rancangan undang-undang tentang pengelolaan di daerah perbatasan, tahun 2013; dan penyusunan naskah akademik dan rancangan undang-undang untuk revisi Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2008 tentang Wilayah Negara, tahun 2016.

Jabatan fungsional peneliti diawali sebagai Peneliti Pertama golongan III/b tahun 1995, Peneliti Muda golongan III/c tahun 1998, Peneliti Ahli Madya golongan IV/a tahun 2006, dan memperoleh jabatan Peneliti Utama golongan IV/d tahun 2012 dan golongan IV/e tahun 2015 bidang hubungan internasional dan politik luar negeri dan politik internasional.

Telah menghasilkan publikasi sebanyak 102 (seratus dua) karya tulis ilmiah (KTI) baik yang ditulis sendiri maupun bersama penulis lain dalam bentuk buku, jurnal, prosiding, dan naskah kebijakan. Sejumlah 11 (sebelas) KTI ditulis dalam bahasa Inggris.

Ikut serta dalam pembinaan kader ilmiah, di antaranya sebagai dosen dan pembimbing tesis (S2/S3) pada Universitas Indonesia, Universitas Paramadina, dan Universitas Pertahanan. Aktif dalam organisasi profesi ilmiah, antara lain sebagai Treasure (2017–2019) dan Secretary General (2019-sekarang) *International Federation of Social Science Organizations* (IFSSO), anggota Tim Penilai Peneliti Instansi (TP2I) LIPI (2016–2019), anggota Tim Koordinasi Pemberian Izin Penelitian Asing (TK-PIPA) Kemenristek Dikti, RI (2016–2021), dan Pengurus Pusat Asosiasi Ilmu Politik Indonesia (AIPI) (1997–2002, 2011–2015,

dan 2015–2019). Sejak 2020 hingga 2023, ditunjuk sebagai *Emminent Person Group* (EPG) mewakili pemerintah Republik Indonesia di *ASEAN Regional Forum* (ARF).

Menerima berbagai tanda penghargaan pada tingkat nasional, antara lain Satyalancana Karya Satya X Tahun (2000) dari Presiden RI, Satyalancana Karya Satya XX Tahun (2009) dan Satyalancana Karya Satya XXX Tahun (2019) dari Presiden RI.

Buku ini tidak diperjualbelikan.

DAFTAR ISI

BIODATA RINGKAS	v
PRAKATA PENGUKUHAN	xi
I. PENDAHULUAN	1
II. MEMAHAMI INDONESIA SEBAGAI NEGARA KEKUATAN MENENGAH: DIMENSI TEORITIS	4
III. BANGKITNYA KEKUATAN MENENGAH POLITIK LUAR NEGERI INDONESIA	7
3.1 Faktor-Faktor yang Memengaruhi Aktivisme Politik Luar Negeri Indonesia sebagai Negara Kekuatan Menengah.....	7
3.2 Politik Luar Negeri Indonesia sebagai Negara Kekuatan Menengah.....	13
IV. KESIMPULAN.....	27
V. PENUTUP	29
UCAPAN TERIMA KASIH	30
DAFTAR PUSTAKA.....	33
DAFTAR PUBLIKASI ILMIAH.....	39
DAFTAR PUBLIKASI LAINNYA	51
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	64

Buku ini tidak diperjualbelikan.

PRAKATA PENGUKUHAN

Bismillaahirrahmaanirrahiim.

Assalamu 'alaikum warahmatullaahi wabarakaatuh.

Salam sejahtera untuk kita semua.

Majelis Pengukuhan Profesor Riset yang mulia dan hadirin yang saya hormati.

Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadiran Allah Swt. atas segala rahmat, nikmat, dan karunia-Nya sehingga dalam kesempatan ini kita dapat berkumpul dan bersama-sama hadir pada acara orasi ilmiah Pengukuhan Profesor Riset di Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN).

Pada kesempatan yang berbahagia ini, dengan segala kerendahan hati, izinkan saya menyampaikan orasi ilmiah dengan judul:

**“POLITIK LUAR NEGERI ERA REFORMASI:
KEBANGKITAN INDONESIA SEBAGAI
NEGARA KEKUATAN MENENGAH DALAM
PERCATURAN REGIONAL DAN GLOBAL”**

Buku ini tidak diperjualbelikan.

I. PENDAHULUAN

Studi politik luar negeri yang saya tekuni mulai terbangun sejak melanjutkan studi S2 International Relations, Monash University, pada 1991. Sebuah bidang studi yang tidak pernah terbayangkan sebelumnya dengan keserjanaan S1 Jurusan Ilmu Pemerintahan, FISIPOL, UGM. “Kecelakaan bidang studi” inilah yang pada akhirnya menjadi sejarah titik balik menekuni studi politik luar negeri.

Studi yang semakin ditekuni setelah selesai Program Master pada 1994 hingga saat ini telah menempuh perjalanan panjang. Di sepanjang perjalanan tersebut, politik luar negeri Indonesia juga mengalami dinamika perubahan dan perkembangan akibat dari pengaruh lingkungan politik domestik dan internasional^{1,2,3}.

Pada tahun 1998, Indonesia mengalami perubahan sistem politik mendasar dengan tumbanganya Soeharto. Peristiwa tersebut menandai sebuah babak baru sejarah Indonesia dari Orde Baru ke Era Reformasi yang demokratis. Selain itu, krisis finansial ekonomi Asia pada Juli 1997 juga memberikan imbas memburuknya kondisi sosial ekonomi dan politik domestik.

Pada saat itu pula, Indonesia sedang mengalami periode demokratisasi dengan B.J. Habibie, Abdurrahman Wahid, dan Megawati sebagai pemimpin transisi sampai dengan pemilihan umum presiden secara langsung untuk pertama kalinya digelar pada 2004 yang menempatkan Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) sebagai pemimpin tertinggi. Hal ini menjadi tantangan bagi SBY dalam memproyeksikan Indonesia di luar tantangan

domestiknya dan mengangkat kembali profil internasional yang pernah dinikmati pemerintahan Soekarno dan Soeharto.

Pada masa SBY, kondisi ekonomi dan politik yang secara perlahan mengalami perkembangan positif mengantarkan Indonesia sebagai negara demokrasi terbesar ketiga di dunia setelah India dan Amerika Serikat. Indonesia menjadi salah satu dari sedikit negara berpenduduk mayoritas Muslim yang aktif dalam introduksi dan konsolidasi demokrasi.

Pada masa SBY, politik luar negeri bebas-aktif dijalankan dengan pendekatan *all-directions foreign policy*. Pada tataran praktis, hubungan dan kerja sama yang baik dengan semua negara diimplementasikan dengan semangat *a million friends, zero enemies*. Pendekatan ini dipertajam dengan fokus Indonesia untuk menjadi jembatan penghubung (*bridge builder*) antara berbagai kepentingan dan posisi dalam kancah internasional. Aktivitas baru yang menjadi *platform* kebijakan luar negeri pada era pemerintahan SBY ini menyebabkan Indonesia kemudian dipandang memiliki posisi dan peran yang semakin penting dalam percaturan global sebagai negara kekuatan menengah (*middle power*)⁴.

Ketika Presiden SBY digantikan Joko Widodo (Jokowi) tahun 2014, politik luar negeri Indonesia memiliki visi politik internasional berbeda. Jokowi memaknai bebas aktif dalam politik luar negeri Indonesia dengan pendekatan yang lebih pragmatis, yang dapat memberikan keuntungan domestik dan memperkuat kedaulatan dan integritas wilayah Indonesia. Politik luar negeri juga mengalami perubahan paradigmatis dengan identitas sebagai negara kepulauan^{5,6}.

Meskipun ada perbedaan orientasi politik luar negeri, Jokowi dan SBY memiliki pandangan sama tentang Indonesia sebagai negara kekuatan menengah serta berupaya membangun

diplomasi kekuatan menengah. Hal ini terlihat dari proyeksi diplomasi kekuatan menengah sebagai target Renstra Kementerian Luar Negeri 2015–2019 dan 2020–2024, yakni memperluas keterlibatan dan meningkatkan peran global sebagai *middle power* untuk mewujudkan dan menjaga perdamaian dan keamanan dunia serta kemakmuran bersama⁷. Peran ini menjadi semakin penting terutama di tengah ketidakpastian situasi keamanan dan ekonomi global.

Perkembangan dinamis politik internasional tersebut memunculkan persoalan sangat mendasar dalam pemikiran, konsep, dan desain kebijakan, terutama dalam politik luar negeri Indonesia. Pendekatan kekuatan menengah digunakan untuk melihat respons Indonesia sebagai negara kekuatan menengah yang memiliki kemampuan khas memengaruhi tatanan internasional. Negara kekuatan menengah bukan semata “*policy takers*”, melainkan juga dapat berperan sebagai “*policy makers*” yang ikut berperan aktif dalam tatanan global politik internasional⁸.

Sekalipun konsep Indonesia sebagai negara kekuatan menengah sudah mulai digunakan pada masa kepemimpinan SBY dan Jokowi, tetapi sebagai sebuah kajian akademik, konsep tersebut masih belum banyak dilakukan. Orasi ilmiah ini merupakan upaya mengisi gap akademik tersebut dengan secara reflektif melihat kembali sejauh mana Indonesia pada Era Reformasi, khususnya masa pemerintahan SBY dan Jokowi, mengukuhkan status dan perannya sebagai negara menengah di tengah pusaran regional dan global.

II. MEMAHAMI INDONESIA SEBAGAI NEGARA KEKUATAN MENENGAH: DIMENSI TEORETIS

Negara kekuatan menengah sebagai sebuah konsep ditemukan secara acak pada studi-studi hubungan internasional sejak abad ke-15. Meskipun demikian, negara kekuatan menengah sebagai sebuah konsep hingga kini masih “*contested*” dan belum ada kesepakatan pendapat⁹. Pada awalnya, konsep ini dipakai dalam diskursus akademik untuk memahami tatanan hierarki dalam *international society*. Negara kekuatan menengah adalah negara yang berada pada bagian tengah hierarki sehingga juga memiliki kemampuan memengaruhi yang moderat, yaitu lebih rendah dari negara-negara *great power*; tetapi berada di atas negara-negara *small power*.

Definisi di atas sifatnya umum sehingga menyulitkan untuk memahami lebih dalam politik luar negeri Indonesia sebagai negara kekuatan menengah. Pemahaman tentang negara menengah perlu dilengkapi dengan tiga pendekatan lain, yaitu (1) kepemilikan kapabilitas (*middlepowerhood*), (2) perilaku (*middlepowermanship*), dan (3) faktor *ideational*⁸.

Pendekatan pertama mengangkat argumen status Indonesia sebagai negara kekuatan menengah adalah berkat kepemilikannya atas sejumlah elemen material yang menjadi sumber daya utama, seperti populasi, geografi, kekuatan militer, dan kekuatan ekonomi. Kepemilikan material ini sangat strategis sebagai unsur penting kekuatan nasional suatu negara dan berimplikasi langsung pada kemampuannya dalam memperjuangkan kepentingan nasional. Pendekatan ini antara lain dikemukakan oleh Jonathan H. Ping, yang menyatakan Indonesia dan Malaysia sebagai *middle power* di Asia Pasifik karena memenuhi prasyarat jumlah penduduk, wilayah geografi, pengeluaran militer, GDP,

Buku ini tidak diperjualbelikan.

gross national income (GNI) per kapita, dan angka harapan hidup¹⁰. Kepemilikan *power* pada tingkat menengah membuat negara kekuatan menengah memiliki ruang untuk melakukan manuver-manuver ketika berhadapan dengan negara besar. Mengingat kapabilitas material dalam parameter masing-masing elemennya bisa menggunakan ukuran berbeda, maka pemaknaan *middle powers* yang hanya dari kapabilitas material menjadi kurang lengkap. Kelemahan ini memunculkan pendekatan perilaku untuk menentukan kekuatan menengah.

Studi politik luar negeri Indonesia yang menggunakan pendekatan ini antara lain dilakukan oleh Beeson dan Lee⁴, serta Thies dan Sari¹¹. Menurut Beeson dan Lee, Indonesia “*has not only begun to act like a middle power in playing a more prominent part in various multilateral organizations, but has also begun to use the language of middlepowerdom is especially significant*”⁴. Perilaku kekuatan menengah yang dimaksud adalah tindakan Indonesia yang semakin banyak terlibat dalam kerja sama multilateral yang berupaya mewujudkan nilai-nilai *good international citizenship, international order*, dan berperan sebagai *coalition-builders, bridge builders, peace keepers*, dan *conflict mediator*. Sementara itu, de Swilande berpendapat negara kekuatan menengah tidak terbatas pada perilaku *passive followers* atau *status quo followers*, melainkan bisa juga sebagai “*critical followers, toxic followers, reformist and swing states*”¹². Lebih lanjut, suatu negara sebagai kekuatan menengah, menurut Thies dan Sari, bukanlah proposisi sekali dan untuk semua. Indonesia terkadang dapat memenuhi harapan perilaku kekuatan menengah tetapi di lain waktu tidak. Indonesia di bawah Presiden Sukarno, Habibie, dan Abdurrahman Wahid tidak berperilaku sebagai *middle powers*¹¹.

Baik faktor material maupun perilaku sama-sama penting dalam mempelajari negara kekuatan menengah, tetapi tidak mampu menangkap kompleksitas politik luar negeri Indonesia sebagai negara menengah. Menurut Laksmana dan Acharya, *power* yang dimiliki Indonesia beragam, tidak hanya bersifat material, melainkan juga nonmaterial^{13,14}. *Power* diperoleh dari posisi ideasional atau normatifnya atas berbagai isu seperti demokrasi, HAM, Islam, stabilitas, dan pembangunan. Presiden SBY berhasil mengombinasikan demokrasi, pembangunan, dan stabilitas¹⁴. Penegasan identitas dan peran negara ini penting untuk memahami bagaimana Indonesia bertindak dalam sistem internasional. Emmers dan Teo menilai Indonesia lebih berhasil sebagai *normative middle power* karena mampu mempromosikan ide-ide di multilateral dan internasional, dibandingkan *functional middle power* sebagai implikasi keterbatasan sumber daya material¹⁵.

Berdasarkan pandangan di atas, hubungan di antara kepemilikan kapasitas menjadi syarat mutlak dengan ditambah pengaruh faktor ideasional yang mendorong perilaku sebagai negara kekuatan menengah. Perilaku negara kekuatan menengah terhadap dinamika politik global merupakan perilaku rasional. Aktivitas negara kekuatan menengah merupakan sebuah kebutuhan demi menghindari pertikaian negara besar yang dapat menyudutkan negara menengah. Sistem internasional dalam kerangka negara kekuatan menengah bukan semata bersifat *self-help*, melainkan juga *other-help* dengan menekankan pada multilateralisme dan koalisi sesama negara menengah¹⁶. Dukungan pada stabilitas dan perdamaian dunia merupakan pilihan rasional demi menjaga *survival* negara kekuatan menengah di tengah dinamika perubahan dan perkembangan tatanan regional dan global.

III. BANGKITNYA KEKUATAN MENENGAH POLITIK LUAR NEGERI INDONESIA

Pada tahun awal transisi dimulainya era reformasi, sulit menemukan pandangan ahli yang menyatakan bahwa Indonesia adalah negara kekuatan menengah. Hal itu karena negara kepulauan ini dihadapkan pada berbagai persoalan multidimensi. Kondisi tersebut menempatkan Indonesia sebagai “*weak state*” dan “*weak power*”, bahkan juga diprediksikan “*collapse*” dan mengalami ‘balkanisasi’¹⁷.

Namun, di luar prediksi tersebut, secara bertahap Indonesia mengalami pemulihan ekonomi-politik pasca-pemerintahan Presiden Megawati (2004). Indonesia yang terjerebab dalam krisis secara perlahan mampu mengatasi masalah domestik. Aktivitas baru menjadi *platform* kebijakan luar negeri pada era pemerintahan SBY dan Indonesia selanjutnya menjadi salah satu negara kekuatan menengah yang diperhitungkan dalam perancangan internasional. Menteri Luar Negeri AS semasa Obama, Hillary Clinton, misalnya, menyatakan Indonesia sebagai “... *key drivers of the global economy, important partners for the United States, and increasingly central contributors to peace and security in the region*”¹⁸.

3.1 Faktor-Faktor yang Memengaruhi Aktivitas Politik Luar Negeri Indonesia sebagai Negara Kekuatan Menengah

Kondisi ekonomi-politik domestik yang semakin positif memberikan ruang kepada pemerintahan SBY dan Jokowi untuk lebih memberikan perhatian pada isu global. Tentu, sebagaimana negara-negara lain di dunia, Indonesia juga mengalami dampak berat penyebaran pandemi COVID-19 pada awal tahun 2020.

Namun hal tersebut tidak menyurutkan Indonesia melalui berbagai inisiatif politik luar negeri untuk terus aktif meningkatkan posisi Indonesia sebagai negara kekuatan menengah di dunia internasional.

Hal ini berbeda dengan pemerintahan era Reformasi semasa dipimpin Presiden B. J. Habibie, Abdurrahman Wahid, dan Megawati, ketika keterlibatan global kurang menjadi fokus. Durasi kepemimpinan yang relatif pendek dan fokus pada kebijakan domestik untuk penataan struktur ekonomi dan politik domestik yang masih rentan sebagai implikasi krisis ekonomi 1997 tampaknya menjadi faktor kendala keterlibatan mereka dalam percaturan internasional.

Ada dua faktor yang dapat menjelaskan munculnya kembali aktivitas politik luar negeri Indonesia sebagai negara kekuatan menengah sejak pemerintahan SBY hingga Jokowi saat ini, yaitu (1) menguatnya kepemilikan material, dan (2) menguatnya identitas dan peran internasional¹⁹.

3.1.1 Menguatnya Kepemilikan Material

Sebagaimana halnya *emerging powers* lainnya, dasar Indonesia berperan aktif pada kancan internasional adalah kepemilikan material, yang oleh Manicom dan Reeves disebut *middle-powerhood*. Indonesia berdasarkan kapabilitas materialnya merupakan negara yang memiliki potensi besar dilihat dari antara lain geografi, penduduk, ekonomi dan militer.

Secara geografi, Indonesia memiliki posisi strategis dalam geopolitik dan geoeкономи global. Indonesia merupakan negara kepulauan terbesar di dunia yang berada di jalur persilangan dua samudra (Pasifik dan Hindia) dan dua benua (Asia dan Australia), serta dilalui jalur pelayaran perdagangan internasional, yaitu Selat Malaka, Sunda, Makassar dan Lombok. Indonesia juga

merupakan wilayah yang terluas di Asia Tenggara dan kaya akan sumber daya alam²⁰.

Sejak era Presiden SBY pada 2004, perekonomian dan kondisi politik domestik juga dapat dikatakan secara bertahap mulai stabil. Transisi yang sempat bergejolak sejak dimulainya demokratisasi 1998 juga relatif mulai terkendali. Eksistensi SBY dan Jokowi pun sangat kuat mengingat pemerintahannya merupakan hasil pemilihan presiden langsung. Pemilihan kepala daerah (pilkada) serentak pun dilaksanakan pada 2015, 2017, 2018, dan 2019. Dengan penduduk muslim terbesar di dunia, Indonesia menjadi model ideal tempat demokrasi dan Islam dapat berjalan beriringan. Sekalipun demikian, upaya konsolidasi demokrasi tersebut belum sepenuhnya berjalan sesuai harapan. Dalam beberapa tahun terakhir, Indonesia mengalami kemunduran kualitas demokrasi atau regresi demokrasi. Ini terindikasi dari laporan Freedom House tentang *Freedom in the World*, bahwa hak politik dan kebebasan sipil di Indonesia terus mengalami kemunduran dari nilai 62 di tahun 2019 menjadi 61 dan 59 di tahun 2020 dan 2021.

Dari aspek ekonomi, Indonesia mampu menggerakkan pertumbuhan ekonomi yang positif. Semasa pemerintahan SBY dan Jokowi, pertumbuhan ekonomi cukup tinggi sekitar 5–6%, Produk Domestik Bruto peringkat ke-16 di dunia pada 2016 dan diprediksi peringkat ke-7 pada 2030 dan menjadi anggota tetap forum G20. Pandemi Covid memang telah membuat perekonomian Indonesia terguncang hingga minus 5,32% pada kuartal I/2020. Namun, sejalan dengan penurunan jumlah kasus Covid-19 serta pelonggaran pembatasan sosial, pertumbuhan ekonomi perlahan mengalami perbaikan dan pada kuartal II/2021 tercatat sebesar 7,07%²¹. Oleh karena itu, tidak mengherankan jika kemudian Goldman Sachs memproyeksikan

masa depan ekonomi Indonesia yang positif dalam terminologi “*The Next-11 (N-11)*”.

Dari aspek kekuatan militer, elemen yang paling menentukan dari kekuatan militer suatu negara adalah jumlah anggaran pertahanan per tahun. Hingga 2004, anggaran pertahanan Indonesia relatif rendah. Pemerintah kemudian secara bertahap mengimplementasikan rencana strategis di bidang pertahanan yang disusun pada 2005 untuk mencapai *Minimum Essential Force* (MEF) pada 2024. Salah satunya mengalokasikan peningkatan anggaran pertahanan untuk pemenuhan MEF mulai 2010–2024 sebesar Rp471 triliun²². Di tengah tuntutan kenaikan fiskal yang timbul dari pandemi Covid-19, Indonesia tetap berkomitmen mempertahankan tingkat pertumbuhan belanja pertahanannya. Anggaran pertahanan tahun 2021 adalah Rp137 triliun, naik 16% dari anggaran tahun sebelumnya sebesar Rp118 triliun²³.

Politik luar negeri memerlukan semacam daya tawar guna menunjang posisi tawar²⁴. Daya tawar di sini adalah kapabilitas material, yakni sumber daya yang besar dari aspek geografi, penduduk, ekonomi, dan militer. Kapabilitas ini menjadi kekuatan penting ketika harus berhadapan dengan negara lain. Meskipun Indonesia memiliki potensi kapabilitas yang besar, tetapi dari aspek *power* masih menjadi tantangan, sebagaimana tercermin melalui *Asia Power Index* 2019. Laporan Lowy Institute ini menunjukkan posisi Indonesia yang cenderung stagnan pada ranking 11 dari 25 negara, berada di atas Vietnam tetapi di bawah Singapura, Malaysia dan Thailand.

3.1.2 Menguatnya Identitas dan Peran Internasional

Bangkitnya kembali keterlibatan internasional Indonesia pasca- Soeharto juga disebabkan oleh penguatan identitas peran Indonesia. Sesuai dengan paradigma konstruktivis, perilaku

negara dipengaruhi oleh identitas negara tersebut. Tingginya keterlibatan Indonesia dalam kancah global dapat dipahami mengingat Indonesia menyanggah berbagai peran internasional yang diaktualisasikan ke dalam pelbagai kebijakan luar negeri.

Sepanjang sejarah berdirinya Negara Kesatuan Republik Indonesia, identitas politik luar negeri Indonesia ada yang bersifat tetap dan tidak tetap. Secara tetap, identitas politik luar negeri mengacu secara normatif pada prinsip dasar politik luar negeri sebagaimana diamanatkan Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Kutipan alinea kesatu dan keempat Pembukaan tersebut memuat secara jelas tiga butir penting prinsip dasar politik luar negeri Indonesia, yaitu komitmen pada antikolonialisme, persamaan/kesederajatan antarbangsa di dunia, dan kepentingan nasional. Di dalam Pembukaan UUD 1945 juga disebutkan lima butir Pancasila yang sekaligus menjadi landasan ideal bagi politik luar negeri RI. Di samping landasan konstitusional dan ideal di atas, politik luar negeri Indonesia juga bertumpu pada prinsip Bebas Aktif.

Meskipun secara normatif historis Indonesia mengklaim memiliki prinsip-prinsip di atas, dalam pelaksanaannya dapat berjalan tidak tetap serta sering terjadi improvisasi disesuaikan dengan perkembangan kondisi domestik dan internasional. Ketika Soekarno berkuasa, politik luar negeri yang ditampilkan adalah antikolonialisme dan imperialisme, serta cenderung lebih mendekatkan diri pada blok komunis. Sementara itu, ketika era Soeharto, politik luar negeri cenderung lebih dekat ke Barat. Pada era Reformasi, Indonesia memasuki suatu era baru dari suatu sistem otoriter menuju sistem demokrasi, dan karenanya nilai-nilai demokrasi serta komitmen dalam menghormati HAM menjadi aspek penting dalam politik luar negeri Indonesia^{25,26,27}.

Identitas peran Indonesia ini diperluas pada masa pemerintahan SBY. Politik luar negeri semasa SBY lebih memperkuat prinsip aktif dengan berbagai peran yang diambil Indonesia sebagai demokrasi muslim, *norms setter*, *consensus builder*, *peace maker*, *bridge builder*, serta *voice of developing world*²⁸.

Pada masa Jokowi, identitas peran yang dicitrakan memiliki persamaan dan juga perbedaan dengan identitas peran pada masa pemerintahan sebelumnya. Politik luar negeri Jokowi juga diarahkan pada peran sebagai pencipta perdamaian dan *bridge builder* melalui komitmennya untuk terlibat aktif dalam forum multilateral guna menciptakan perdamaian dan keamanan dunia. Namun, politik luar negeri juga diarahkan untuk pemenuhan kepentingan nasional sebagai Poros Maritim Dunia^{29,30}. Salah satunya, Indonesia mendorong dilakukannya dialog dan kerja sama di bidang maritim dengan berbagai negara di dunia. Di ASEAN, misalnya, Indonesia memimpin pertemuan 7th *ASEAN Maritime Forum* dan 5th *Expanded ASEAN Maritime Forum* pada Desember 2017. Indonesia juga secara aktif terlibat dalam *Indian Ocean Rim Association* (IORA), Hal itu ditunjukkan ketika pada 2016 Indonesia menggantikan Australia sebagai pimpinan IORA. Lebih lanjut, Duta Besar Indonesia untuk Afrika Selatan periode 2018–2022, Salman Al Farisi, terpilih sebagai Sekretaris Jenderal IORA untuk masa jabatan 2022–2024. Sebagai negara kepulauan, Indonesia juga berperan penting dalam pembentukan *Archipelagic and Island States Forum* (AIS Forum) pada 1 November 2018 di Manado. Bersama UNDP, Indonesia juga menggalang Pembiayaan Biru Negara Kepulauan Anggota AIS

Forum untuk membantu mereka dalam mengatasi perubahan iklim pada 5 November 2021 di Glasgow, Skotlandia.

3.2 Politik Luar Negeri Indonesia sebagai Negara Kekuatan Menengah

Jika dilihat dari aspek historis, politik luar negeri Indonesia sejak kemerdekaan hingga kini selalu terlihat adanya upaya dari para pembuat kebijakan untuk berperan aktif sebagai negara kekuatan menengah di pentas internasional.

Pada Demokrasi Parlemitter (1950–1959), Presiden Soekarno asertif mendukung gerakan perlawanan terhadap kolonialisme, imperialisme, dan neo-kolonialisme dengan cara konstruktif melalui *non-alignment*, meskipun kapabilitas material di dalam negeri yang terbatas tidak mendukung perilaku internasional yang efektif. Namun, Indonesia mampu menyatukan negara-negara di Asia dan Afrika untuk menyelenggarakan Konferensi Asia Afrika tahun 1955 yang selanjutnya membuahkan Gerakan Non-Blok³¹. Aktivitas politik luar negeri untuk memperoleh status dan haknya sebagai negara kepulauan dari Deklarasi Djuanda tahun 1957 melalui forum multilateral juga dapat dilihat sebagai bentuk diplomasi Indonesia sebagai negara menengah³². Namun, status ini sulit dipertahankan Soekarno pada era Demokrasi Terpimpin (1959–1965) dengan kebijakan luar negeri yang menjauh dari multilateralisme, antara lain dengan keluar dari PBB dan konfrontasi Malaysia.

Pada masa Orde Baru, politik luar negeri pada pertengahan 1960-an hingga awal 1970-an dijalankan secara *low profile* dengan fokus stabilitas dan pembangunan ekonomi. Oleh karena itu, politik luar negeri Indonesia dijalankan dengan mendekati diri pada negara-negara barat untuk menarik investasi dan menggalang kerja sama regional melalui pembentukan *Associa-*

tion of Southeast Asian Nations (ASEAN) tahun 1967. ASEAN telah memenuhi visi Soeharto akan stabilitas dan perdamaian di kawasan yang memungkinkan dilaksanakannya pembangunan ekonomi dengan baik dan negara-negara adidaya “keluar” dari kawasan. Sepanjang tahun 1970 hingga awal 1980-an Indonesia juga sangat aktif dalam perundingan untuk pengakuan Indonesia sebagai negara kepulauan yang selanjutnya melahirkan kaidah hukum laut baru dengan Konvensi PBB tentang Hukum Laut (*United Nations Convention on the Law of the Sea, UNCLOS*) tahun 1982³³. Sejak tahun 1980-an, Indonesia juga aktif di Organisasi Kerja Sama Islam (OKI), Gerakan Non-Blok (GNB), dan *Asia-Pacific Economic Cooperation* (APEC). Tidak berlebihan bila kemudian hingga sampai akhir periode Soeharto, politik luar negeri Indonesia memiliki citra yang positif. Tidak saja lebih percaya diri, Indonesia juga dipandang berperan signifikan dalam terwujudnya perdamaian dan stabilitas di Asia Tenggara³⁴.

Pada era reformasi B. J. Habibie, Abdurrahman Wahid, dan Megawati, relatif tidak banyak inisiatif politik luar negeri yang dilakukan. Peran Indonesia sebagai negara menengah yang sudah dimainkan para pemimpin pendahulu hampir terabaikan. Mereka lebih memfokuskan penyelesaian berbagai persoalan domestik. Politik luar negeri yang tercatat pada masa B. J. Habibie adalah tawaran jajak pendapat di Timor Timur tahun 1999 dan diterbitkannya UU Nomor 5/1998 dan UU Nomor 29/1999 yang mengesahkan dua konvensi internasional berkaitan dengan hak asasi manusia. Sementara itu, Abdurrahman Wahid mengusulkan kerja sama strategis antara Indonesia, India, dan Tiongkok, serta Forum Pasifik Barat yang terdiri dari Indonesia, Filipina, Australia, PNG, dan Timor Leste, meskipun dua inisiasi tersebut tidak bersambut dengan positif. Di samping melakukan restrukturisasi organisasi Kementerian Luar Negeri, Indonesia pada masa Megawati sebagai Ketua ASEAN tahun 2003 menginisiasi

Buku ini tidak diperjualbelikan.

pembentukan *ASEAN Security Community* yang kemudian berganti nama menjadi *ASEAN Political Security Community* sebagai salah satu pilar *ASEAN Community*. Isu demokrasi dan hak asasi manusia mulai dimasukkan Indonesia dalam ASEAN, terutama dalam *ASEAN Political Security Community* tersebut. Politik luar negeri Indonesia juga ikut mendukung perang global terhadap terorisme dan pemanasan global^{35,36,37,27}.

Politik luar negeri yang relatif menyurut kiprahnya kemudian terlihat bangkit kembali pada masa kepemimpinan SBY dan Jokowi. Politik luar negeri menjadi salah satu prioritas dalam kebijakan nasional. Pemerintah mengembangkan apa yang disebut Poole sebagai “*a more activist approach*” dalam politik luar negerinya⁴. Meskipun orientasi kebijakan luar negeri kedua pemimpin memiliki perbedaan, tetapi ada kesamaan untuk meningkatkan peran “*constructive power*” sebagai negara kekuatan menengah dengan fokus pada isu demokrasi, perdamaian, dan keamanan.

Kebangkitan politik luar negeri Indonesia sebagai negara menengah pada masa SBY dan Jokowi setidaknya dapat dilihat pada dua hal, yakni (1) mempromosikan demokrasi, HAM, Islam, dan negara kepulauan serta (2) merespons ketidakpastian lingkungan strategis.

3.2.1 Mempromosikan Demokrasi, HAM, Islam, dan Negara Kepulauan

SBY dan Jokowi meletakkan isu demokrasi, Islam, dan HAM sebagai bagian dari politik luar negeri. Kedua pemimpin membangun citra Indonesia sebagai negara demokratis, peduli HAM, dan corak Islam yang moderat. Namun, mereka memiliki pendekatan berbeda. SBY memberi peran sentral pada ketiga isu tersebut, sedangkan Jokowi terlihat ambigu. Meskipun Jokowi

menyatakan akan “memperkuat peran Indonesia sebagai negara demokratis dan berpenduduk mayoritas Muslim moderat dalam mendorong kerja sama global dan regional untuk membangun demokrasi dan toleransi antarkelompok”³⁸, tetapi Jokowi tidak berupaya memproyeksikan tiga isu tersebut sebagai identitas utama dalam politik luar negerinya. Jokowi lebih mengedepankan Indonesia sebagai negara kepulauan dalam pelaksanaan diplomasi dan membangun kerja sama internasional.

Selama pemerintahan Presiden SBY, Indonesia meningkatkan perannya melalui keikutsertaannya dalam berbagai isu *global governance* dan forum multilateral. Pendekatan Indonesia sebagai aktor penting global adalah dengan mengusung identitas baru sebagai negara demokrasi. Realitas Islam dan demokrasi berjalan bersama-sama di Indonesia. Hal ini menjadi modal pemerintah untuk meningkatkan peran dalam pergaulan internasional dengan mempromosikan identitas nasional sebagai negara demokrasi²⁵. *Interfaith dialogues* yang diselenggarakan Indonesia dalam berbagai forum bilateral dan multilateral pada masa SBY dan Jokowi merupakan wujud konkret diplomasi publik politik luar negeri Indonesia sebagai negara yang memiliki corak Islam moderat. Meningkatnya aktivitas terorisme dan *violent extremism* sejak peristiwa 9/11 yang menyalahgunakan nama Islam memberikan peluang Indonesia untuk mempromosikan Islam moderat.

Berbagai pengalaman demokrasi dilaksanakan Indonesia pada tingkat bilateral, regional, dan internasional. Secara bilateral, promosi Indonesia terlihat, misalnya, dalam keterlibatannya dalam kasus Myanmar. Pada tingkat regional, Indonesia menginisiasi dan memasukkan kerja sama regional untuk promosi dan perlindungan HAM, demokrasi, dan *good governance* di ASEAN *Political Security Community* dan Piagam ASEAN.

Indonesia juga memperlihatkan kepemimpinannya pada tingkat multilateral dengan melembagakan norma demokrasi dan HAM melalui *Bali Democracy Forum*.

Meskipun keterlibatan Indonesia dalam upaya memengaruhi ketertiban dunia dengan mengaitkan pengalaman demokrasinya mendapatkan apresiasi internasional, tetapi di dalam negeri masih menghadapi sejumlah persoalan. Penguatan identitas demokrasi yang di dalamnya seharusnya juga ada elemen penyelesaian konflik tanpa kekerasan, penegakan hukum, berkurangnya korupsi, dan penghormatan atas nilai-nilai universal HAM, sebagaimana dinyatakan Hayes dan Elson serta dikutip Poole, masih belum optimal dilakukan di dalam negeri⁴.

Upaya ini juga tampak ada ambiguitas antara retorik dan praktik pada masa Jokowi. Jokowi tidak menolak narasi demokrasi, Islam, dan HAM dengan tetap meyakinkan masyarakat internasional akan komitmennya, tetapi pada sisi lain pemerintahnya mengambil langkah yang tidak sejalan dengan narasi HAM lewat pelaksanaan hukuman mati yang sudah dimoratorium oleh pemerintah SBY.

Dalam masa pemerintahannya, Jokowi memberikan kebaruan dalam politik luar negeri Indonesia dengan identitas sebagai “Negara Maritim”. Sekalipun sudah ada pengakuan Negara Kepulauan dalam UNCLOS 1982, tetapi perhatian pada isu kemaritiman sangat terbatas pada masa-masa pemerintahan sebelumnya. Inti dari negara kepulauan terbesar di dunia ini mengharuskan Indonesia untuk mampu mewujudkan fungsi sebagai poros maritim dunia (*global maritime fulcrum*), karena sebagaimana disampaikan Jokowi di KTT Asia Timur di Naypyitaw, Myanmar pada 13 November 2015, negara ini

menguasai jalur laut paling strategis antara Samudra Hindia dan Pasifik.

Untuk mewujudkan cita-citanya sebagai Poros Maritim Dunia, pemerintah menyusun dokumen yang memuat pedoman jangka panjang kebijakan kelautan Indonesia dalam Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2017. Ada tujuh pilar utama kebijakan kelautan, yakni pengelolaan sumber daya alam dan pengembangan sumber daya manusia; pertahanan, keamanan, dan penegakan hukum serta keselamatan di laut; tata kelola dan kelembagaan; ekonomi maritim; pengaturan ruang laut dan perlindungan lingkungan laut; budaya maritim; dan diplomasi maritim. Dalam upaya menjadikan Indonesia sebagai Poros Maritim Dunia, Indonesia berkepentingan menjadikan kawasan maritim di Indo-Pasifik sebagai zona damai, bebas, netral, serta membawa kemakmuran bagi semua yang akan dicapai, antara lain, melalui kerja sama *East Asia Summit* (EAS), *Indian Ocean Rim Association* (IORA), dan *ASEAN Outlook on Indo-Pacific* (AOIP). Indonesia juga mendukung penyelesaian damai konflik Laut China Selatan, yakni dengan mendorong kesepakatan *code of conduct* (CoC) Laut China Selatan antara ASEAN dan Tiongkok.

3.2.2 Merespons Ketidakpastian Lingkungan Strategis

Ketika proses demokratisasi pasca-Soeharto berlangsung, lingkungan strategis di Indo-Pasifik juga mengalami perubahan. Selama dua dekade hingga saat ini, kebangkitan Tiongkok, *Belt Road Initiative*, konflik Semenanjung Korea, sengketa maritim, konflik Laut China Selatan, ancaman kejahatan transnasional, ketegangan perdagangan AS-Tiongkok, dan pandemi Covid-19 menjadi tantangan bagi tatanan regional pasca-Perang Dingin. Berbagai perubahan besar tersebut terjadi di bawah bayang-bayang persaingan kekuatan negara-negara besar di kawasan.

Buku ini tidak diperjualbelikan.

Kompetisi dalam arsitektur keamanan regional baru-baru ini melibatkan lapisan pertama antara Tiongkok dan AS, yang diikuti dengan lapisan berikutnya melibatkan Jepang, India, Australia, Inggris, Korea Selatan, dan Korea Utara.

Dalam dinamika hubungan dengan negara besar di kawasan di atas, Indonesia sebagai negara kekuatan menengah terpengaruh oleh keberadaannya. Meskipun demikian, sebagai negara menengah, Indonesia mempercayai dirinya dapat memainkan peran penting dalam mengelola perubahan tatanan regional. Merespons tantangan tersebut, pemerintahan SBY dan Jokowi sama-sama memandang pentingnya membangun ekosistem perdamaian, stabilitas, dan kesejahteraan di kawasan⁴.

Berkaitan dengan itu, setidaknya ada empat fokus utama yang dapat dilihat dari pelaksanaan politik luar negeri Indonesia pada masa SBY dan Jokowi.

3.2.2.1 Revitalisasi kekuatan nasional

Indonesia memfokuskan revitalisasi kekuatan nasionalnya pada dua bidang, yaitu ekonomi dan keamanan. Di bidang ekonomi, pemerintah hingga saat ini belum menggarap secara optimal peluang ekonomi di kawasan, terutama dengan dua negara berpenduduk terbesar di dunia, yaitu Tiongkok dan India. Indikasi ini antara lain terlihat dari jumlah Konsulat Jenderal (Konsjen) di Tiongkok. Indonesia hanya memiliki 3 (tiga) sementara Malaysia 6 (enam), Thailand 8 (delapan) dan Singapura 7 (tujuh)⁶. Sementara itu, terkait hubungan dengan India, konektivitas penerbangan langsung baru terbangun sejak pemerintahan Jokowi, yaitu Indonesia-Mumbai³⁹.

Di bidang keamanan, peningkatan kapabilitas militer masih terus menjadi perhatian dan prioritas pemerintah Indonesia. Meskipun sudah ada kenaikan anggaran pertahanan, tidak

otomatis berdampak pada peningkatan kapabilitas militer, terutama akuisisi sistem persenjataan modern sebab sekitar 2/3 anggaran pada 2010–2018 lebih banyak pada pengeluaran terkait kepegawaian²¹. Oleh karena itu, distribusi anggaran pertahanan perlu lebih dialokasikan untuk modernisasi alutsista. Peningkatan kemampuan militer ini diperlukan untuk mencapai target MEF tahun 2024, yaitu menjaga kedaulatan dan integritas wilayah.

Sesuai dengan visi politik luar negeri, yaitu Indonesia sebagai poros maritim dunia, cara memandang sistem pertahanan juga seharusnya berubah. Faktor geografis Indonesia sebagai negara kepulauan membuat *continental based defense* yang berfokus pada kekuatan Angkatan Darat menjadi tidak relevan. Indonesia sudah seharusnya menggunakan paradigma pertahanan kepulauan berdasarkan doktrin *maritime based defense* yang menekankan pada kekuatan Angkatan Laut dan Angkatan Udara. Dua kekuatan tersebut sangat penting karena faktor geografis negara kepulauan membutuhkan respons cepat terhadap setiap ancaman yang tidak mungkin dilakukan lewat darat. Perubahan paradigma ini terlihat pada masa Jokowi, salah satunya melalui anggaran pertahanan untuk memenuhi kebutuhan MEF sebesar Rp121,1 triliun, yang meliputi anggaran matra laut dan udara masing-masing sebesar Rp17,9 triliun dan Rp93,9 triliun jauh lebih besar dibandingkan matra darat sebesar Rp9,3 triliun²².

Embargo produk-produk militer AS dan Uni Eropa pasca-jajak pendapat di Timor Timur tahun 1999 berdampak serius terhadap kemampuan pertahanan Indonesia^{17,40}. Diversifikasi sumber alutsista menjadi suatu pilihan kebijakan dengan melakukan kerja sama dengan negara-negara di kawasan, seperti Jepang, Korea Selatan, India, dan Turki. Diversifikasi ini juga dibarengi dengan tuntutan transfer teknologi militer agar ke depannya

Indonesia dapat memiliki kemampuan lebih mandiri tanpa menjadi kekuatan disruptif.

3.2.2.2 Membangun tata perilaku dan institusi regional/global

Sejak awal pembentukan ASEAN, Indonesia berpendapat bahwa Asia Tenggara harus menjadi kawasan aman dan damai. Untuk itu, kawasan ini harus bebas dari persaingan kekuatan negara besar. Hubungan antarnegara besar dikelola melalui ASEAN dengan melembagakan hubungan antar-*major powers*, yaitu dengan membawa mereka ke dalam kerangka dialog, mengatur agenda kerja sama dalam kerangka kerja sama regional, serta mengikat semua kekuatan di kawasan dalam ikatan kerja sama untuk mencegah timbulnya dominasi oleh salah satu *major powers*⁴¹. Format kerja sama yang terbentuk adalah *ASEAN Regional Forum (ARF)*, *ASEAN+3*, *ASEAN Ministerial Defence Dialogue*, dan *KT Asia Timur (East Asia Summit, EAS)*, yang didasarkan pada prinsip tata hubungan antarnegara melalui *Treaty of Amity and Cooperation in Southeast Asia (TAC)* dan *Zone of Peace, Freedom, and Neutrality (ZOPFAN)*. Atas inisiatif Indonesia, ASEAN kembali menegaskan dua prinsip tersebut yang tertuang dalam pernyataan para Menlu ASEAN pada 8 Agustus 2020.

Ketika sebagai Ketua ASEAN 2011, Indonesia berhasil menarik AS dan Rusia untuk resmi bergabung di EAS dan sebelumnya pada 2005 Indonesia juga menjadi negara yang mendukung keanggotaan India di forum tersebut. Pelibatan semua *major power* dalam EAS dapat dipandang sebagai strategi untuk meredakan ketegangan, dengan mengubah potensi konflik menjadi potensi kerja sama guna terciptanya sebuah keseimbangan

dinamis (*dynamic equilibrium*) di kawasan, tanpa adanya satu kekuatan hegemon.

Prinsip sentralitas ASEAN yang dipegang teguh dalam mengelola hubungan antarnegara besar dalam kenyataannya juga tidak mudah dipraktikkan di tengah keadaan ASEAN yang menghadapi persoalan soliditas dan kesatuan^{42.43}. Persoalan ini tercermin dari ketidakmampuan ASEAN mengeluarkan komunikasi bersama terkait konflik Laut China Selatan di pertemuan tahunan Menlu ASEAN di Kamboja (2012) dan Vientiane (2016), serta menindaklanjuti pelaksanaan Kesepakatan Lima Poin (*Five-Point Consensus*) terkait konflik di Myanmar yang disepakati pada pertemuan tingkat tinggi ASEAN yang diinisiasi Presiden Jokowi di Jakarta pada 24 April 2021.

Meskipun demikian, Indonesia tetap melihat ASEAN dan Asia Tenggara sebagai bagian strategis kepentingan utamanya. Indonesia berusaha untuk terus memastikan bahwa ASEAN tetap memegang kendali dalam pembangunan arsitektur regional di Indo-Pasifik. Posisi ini terefleksikan pada Januari 2018, ketika Indonesia menyatakan stabilitas keamanan regional tidak akan bisa dipisahkan dari peran sentral ASEAN dalam konsep Indo-Pasifik⁴⁴. Salah satu keberhasilan Indonesia dalam mendorong wacana ini adalah dengan diadopsinya *ASEAN Outlook on Indo-Pacific* (AOIP) pada 2019. AOIP merupakan penegasan posisi ASEAN dalam peranannya untuk menjaga perdamaian, keamanan, stabilitas, dan kemakmuran di kawasan Indo-Pasifik. *Outlook* ini mengedepankan pendekatan dialog dan kerja sama yang terbuka dan inklusif. Empat bidang yang menjadi prioritas, yaitu maritim, ekonomi, konektivitas, dan pencapaian SDGs.

Gagasan ini menggarisbawahi keberanian Indonesia sebagai negara kekuatan menengah dalam bermanuver di tengah persaingan aspirasi geoekonomi dan geopolitik kekuatan negara-negara besar. Indonesia juga tidak ikut dalam “Free and Open

Indo-Pacific” Jepang dan AS, *Quadrilateral Security Dialogue (QUAD)*-nya AS, Jepang, Australia, dan India, serta AUKUS pakta keamanan trilateral antara Australia, Inggris dan AS³⁹. Indonesia ingin tetap memelihara *strategic autonomy* dengan tidak memihak dalam persaingan AS-Tiongkok. Dengan konsepsi Indo-Pasifiknya, peran Indonesia sebagai *norm-builder* terlihat dalam mengelola tatanan Indo-Pasifik dengan inklusif.

Hanya saja, konsep Indo-Pasifik masih perlu dikaji lebih lanjut. Pemerintah belum mengeluarkan sebuah cetak biru akan peran sentralitas ASEAN yang diusulkan. Jangan sampai keberadaan Indo-Pasifik justru melemahkan ASEAN yang dalam konteks kerja sama tersebut seharusnya memiliki peran sentral. Bagaimana ASEAN bisa bermain sentral kalau sentralitas ASEAN sendiri saat ini sedang menghadapi tantangan soliditas dan kesatuan juga menjadi persoalan penting lainnya.

Meskipun ASEAN tetap menjadi pilar utama, politik luar negeri Indonesia juga mulai memberikanimbangan perhatian pada negara-negara di kawasan Samudra Hindia. Ini sebagai bagian dari tekad mewujudkan Indonesia sebagai Poros Maritim Dunia. Kawasan ini dipandang sangat strategis sebagai penghubung Asia-Afrika dan jembatan menuju Eropa. Potensi kerja sama ekonomi juga menjadi bagian kepentingan Indonesia untuk melakukan investasi dan perdagangan. Pentingnya kawasan Samudra Hindia dalam politik luar negeri Indonesia dapat dilihat dari keikutsertaan Indonesia dalam *Indian Ocean Rim Association (IORA)*.

Diplomasi Indonesia sebagai negara kekuatan menengah memiliki karakter utama menjembatani berbagai perbedaan dan menjadi bagian dari solusi. Indonesia konsisten berupaya membangun koalisi untuk memperkuat paradigma kerja sama yang saling menguntungkan dan berkeadilan. Karakter dan peran ini semakin terlihat di tengah terus meningkatnya rivalitas

dan sikap proteksionisme yang terjadi bahkan selama pandemi Covid-19. Indonesia sangat aktif mendukung upaya penanganan pandemi dan secara konsisten memperjuangkan prinsip vaksin sebagai *public goods*, akses setara, aman, dan harga terjangkau. Ada tiga resolusi terkait kesehatan/pandemi yang diinisiasi Indonesia di PBB, yaitu (1) *Global Solidarity to fight Covid-19*; (2) *Global Health and Foreign Policy: Strengthening Health System Resilience through Affordable Healthcare for All*; dan (3) *International cooperation to address challenges faced by seafarers as a result of the Covid-19 pandemic to support global supply chains*. Sebagai bentuk komitmen Indonesia untuk dapat lebih berkontribusi bagi perdamaian dan isu kemanusiaan dunia, menjelang akhir 2019, Indonesia juga telah meluncurkan *Indonesian-AID* yaitu dana kerja sama pembangunan.

3.2.2.3 Membangun Kemitraan Strategis dan Komprehensif

Di samping menekankan akan pentingnya regionalisme dan multilateralisme, Indonesia juga meningkatkan fokusnya untuk membangun hubungan bilateral dengan negara-negara kunci di kawasan dalam bentuk Kemitraan Strategis dan Kemitraan Komprehensif. Pada 1999–2014, Indonesia menandatangani 86 perjanjian bilateral pertahanan serta kesepakatan keamanan dan kemitraan dengan 31 negara, termasuk dengan negara-negara besar di kawasan, seperti AS, Tiongkok, Jepang, Rusia, dan India. Kemitraan strategis juga terwujud dalam kerjasama ekonomi melalui perjanjian perdagangan Indonesia dengan negara-negara mitra. Per Oktober 2021, Indonesia memiliki 23 CEPA/PTA/FTA/*Economic Agreement* dan 10 lainnya sedang dalam proses perundingan.

Kemitraan ini banyak dibangun pada masa pemerintahan SBY, sedangkan Jokowi terlihat lebih banyak melanjutkan kebijakan tersebut. Meskipun demikian, di samping memperkuat

secara normatif kemitraan strategis sebelumnya, seperti yang dilakukannya dengan Jepang pada 15 Januari 2017 melalui “*Japan-Indonesia Joint Statement on Strengthening Strategic Partnership*”, Jokowi juga mengakselerasi sejumlah implementasi kemitraan strategis dan komprehensif yang belum optimal^{45,46,6}.

Berbeda dengan SBY, Jokowi cenderung mengaitkan implementasi kemitraan tersebut dengan isu-isu praksis yang menjadi kepentingan nasional dan kepentingan bersama dengan negara mitra, yaitu isu-isu yang terkait dengan keamanan, keselamatan, dan pembangunan maritim. Melalui penguatan kemitraan strategis dan komprehensif ini, Jokowi tidak hanya mampu lebih mempererat hubungan baik secara bilateral dengan negara-negara kunci di kawasan, seperti Jepang, Tiongkok, dan India, tetapi juga bisa menarik manfaat dari persaingan di antara mereka. Pemberian izin pembangunan industri perikanan di 6 (enam) pulau terluar (Sabang, Natuna, Morotai, Saumlaki, Moa, dan Biak) ke Jepang, izin pembangunan pelabuhan di Sabang ke India, serta izin pembangunan kereta api cepat Bandung–Jakarta ke Tiongkok menjadi indikasi atas kemampuan Indonesia menentukan arah hubungan bilateral dengan negara-negara besar di kawasan untuk kepentingan nasionalnya⁶.

3.2.2.4 Membangun kerja sama sesama kekuatan menengah

Keterbatasan kapasitas menjadi salah satu faktor pendorong negara kekuatan menengah melakukan *network diplomacy* dengan sesamanya. Keterlibatan Indonesia di MIKTA (Meksiko, Korea Selatan, Turki, dan Australia) merupakan salah satu wujud perannya sebagai negara kekuatan menengah. MIKTA yang terbentuk pada 2013 merupakan salah satu inisiatif *middle power* dari lima negara anggota G20. Pembentukan forum ini selain bertujuan untuk menjembatani kelompok G7 dan BRICS, juga

Buku ini tidak diperjualbelikan.

bertujuan untuk ikut terlibat dalam “*global governance*”. Sebagaimana MIKTA *Vision Statement* menyatakan bahwa “... *what brings these geographically and culturally divergent nations together is a necessity to coordinate within G20 and beyond*”⁴⁷.

Kerja sama yang sudah berlangsung lebih dari lima tahun ini dalam perkembangannya dipandang lambat, misalnya jika dibandingkan dengan BRICS. Salah satu penyebabnya adalah adanya perbedaan perilaku sesama negara kekuatan menengah. Australia dan Indonesia, misalnya, perbedaannya terlihat dalam *inclusive institutional balancing* yang dilakukan Indonesia dengan konsepsi AOIP, sedangkan Australia melakukan *hard balancing* terhadap Tiongkok dengan *QUAD* dan *AUKUS*. Di samping itu, Turki di bawah pemerintahan Presiden Recep Tayyip Erdogan yang cenderung otoritarian membuat koalisi negara demokrasi dalam MIKTA menjadi problematik.

IV. KESIMPULAN

Dari perjuangan melawan penjajahan hingga pemeliharaan perdamaian dan stabilitas di kawasan dan mempromosikan demokrasi, Indonesia secara konsisten memainkan peran aktif dalam percaturan politik internasional. Aktivitas politik luar negeri Indonesia sebagai negara kekuatan menengah pada masa pemerintahan SBY dan Jokowi sangat dipengaruhi oleh peningkatan kemampuan material dan *ideational resources*. Namun, kemampuan material ini tidak selalu menjadi faktor mutlak dalam perilaku aktivitas politik luar negeri Indonesia. Keterbatasan kapabilitas material tidak menghalangi kemampuan kekuatan inisiatif Indonesia, menjembatani perbedaan, dan menyatukan berbagai pihak menuju *common interests*. Di samping penggunaan kapabilitas nasional, dalam memproyeksikan diri sebagai kekuatan menengah Indonesia juga sering kali menggunakan *platform* ASEAN.

Kebangkitan politik luar negeri Indonesia sebagai negara kekuatan menengah pada masa SBY dan Jokowi setidaknya dapat dilihat pada dua hal, yakni dalam hal mempromosikan demokrasi, HAM, Islam, dan negara kepulauan, serta merespons perubahan lingkungan strategis kawasan. Terkait dengan yang terakhir, ada empat fokus utama yang dilakukan, yakni revitalisasi kekuatan nasional, membangun tata perilaku dan institusi regional/global, membangun kemitraan strategis dan komprehensif, serta kerja sama sesama negara kekuatan menengah.

Namun, sebaik apa pun strategi melalui pendekatan internal dan eksternal tersebut, jika dalam pelaksanaannya terkendala oleh masalah internal dan kurang didukung oleh strategi yang piawai, usaha Indonesia untuk secara aktif berperan dalam percaturan global menemukan hambatan serius. Inisiatif-inisiatif

yang acap dilontarkan Indonesia tanpa diikuti implementasi yang konsisten juga hanya terkesan untuk sekedar menampilkan citra. Jika hal tersebut kemudian tidak disertai kapabilitas domestik untuk mewujudkannya, hasilnya malah akan memperburuk citra Indonesia sendiri.

Di samping strategi normatif sebagai negara kekuatan menengah yang telah berhasil dimainkan perannya, Indonesia juga perlu meningkatkan sumber daya material agar dapat menjalankan strategi fungsional yang hasilnya lebih terukur. Dengan demikian, Indonesia bisa memadukan strategi normatif dan fungsional dalam menjalankan peran sebagai negara kekuatan menengah.

Indonesia perlu secara serius memperkuat identitas dengan tidak melihat kepentingan jangka pendek serta didukung oleh kapabilitas domestik yang kuat. Terkait hal tersebut, pelibatan pemangku kepentingan juga diperlukan sehingga ada legitimasi lebih kokoh untuk mendukung pelaksanaan politik luar negeri di masa depan.

V. PENUTUP

Keberadaan negara-negara kekuatan menengah dalam hubungan antarnegara merupakan suatu hal yang tidak bisa diabaikan. Bukan hanya faktor posisi menengah dalam struktur internasional, melainkan kelompok negara-negara menengah memiliki kekhasan dalam merespons dan memengaruhi tatanan internasional dengan menampilkan diri sebagai *constructive power*. Dalam hal ini, negara kekuatan menengah yang memainkan peran sebagai pemimpin regional bisa memainkan peran besar dalam mempromosikan perdamaian dan stabilitas kawasan. Indonesia sebagai negara terbesar dan “natural leader” di kawasan, perlu terus menjaga ASEAN karena ASEAN tanpa peran aktif Indonesia akan menjadi lemah.

Sekalipun ada perilaku tertentu yang menjadi karakteristik negara kekuatan menengah, tetapi perilaku-perilaku tersebut juga bisa berubah dan berbeda. Hal itu karena ada dimensi kontekstual sosial dengan *nexus* domestik dan internasional yang memengaruhinya. Oleh karena itu, perlu studi-studi lebih lanjut mengenai politik luar negeri negara kekuatan menengah di masa depan—termasuk di dalamnya studi lebih lanjut tentang politik luar negeri kekuatan negara menengah Indonesia dengan identitasnya sebagai negara kepulauan. Jokowi sudah menyatakan Indonesia sebagai negara kepulauan dalam pelaksanaan diplomasi dan membangun kerja sama internasional, tetapi operasionalisasi konsep tersebut dalam diplomasinya masih terlihat bersifat terbatas pada hubungan bilateral dan belum banyak diterapkan pada hubungan multilateral yang menjadi pilar pokok diplomasi negara kekuatan menengah.

UCAPAN TERIMA KASIH

Sebagai penutup dari orasi ini, izinkan saya mengucapkan syukur kepada Allah Swt., karena berkat rahmat dan karunia-Nya saya bisa menyampaikan orasi ini. Selanjutnya, perkenankan saya mengucapkan terima kasih kepada berbagai pihak yang telah berkontribusi dalam perjalanan karier saya sebagai peneliti hingga meraih gelar Profesor Riset.

Penghargaan dan ucapan terima kasih saya sampaikan kepada Presiden Republik Indonesia, Ir. H. Joko Widodo; Kepala Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN), Dr. Laksana Tri Handoko, M.Sc.; Ketua Majelis Pengukuhan Profesor Riset, Prof. Dr. Ir. Bambang Subiyanto, M.Agr.; Sekretaris Majelis Pengukuhan Profesor Riset, Prof. Dr. Gadis Sri Haryani; Plt. Sekretaris Utama BRIN, Rr. Nur Tri Aries Suestiningtyas, S.I.P., M.A.; Plt. Kepala Biro Organisasi dan Sumber Daya Manusia BRIN, Ratih Retno Wulandari, S.Sos., M.Si.; Kepala OR IPSH BRIN, Prof. Dr. Najib Burhani; dan Plt. Kepala Pusat Riset Politik, Dr. Atiqah Nur Alami. Saya juga menyampaikan terima kasih kepada Deputi IPSK LIPI terdahulu, Prof. Dr. Tri Nuke Pudjiastuti, M.A., atas dukungan kepada saya dalam menyampaikan orasi ilmiah ini.

Pada kesempatan ini saya juga mengucapkan terima kasih kepada Tim Penilai Naskah Orasi Prof. Dr. Dewi Fortuna Anwar, Prof. Dr. Syamsuddin Haris, dan Prof. Aleksius Jemadu, Ph.D. sehingga naskah ini layak diorasikan.

Saya juga mengucapkan terima kasih kepada para senior, kolega peneliti, dan staf pendukung di Pusat Riset Politik dan Pusat Riset Kewilayahan, dua satuan kerja tempat saya meniti karier selama di LIPI dan BRIN. Tanpa bermaksud mendahulukan satu dengan yang lainnya, diantaranya adalah Dr. Alfian (alm.), Prof.

Dr. Mochtar Pabottingi, Dr. CPF. Luhulima, Prof. Drs. Riza Sihbudi (alm.), Ambassador Prof. Dr. Ikrar Nusa Bhakti, Prof. Dr. Hermawan Sulistyono, Prof. Dr. Indria Samego, Prof. Dr. Siti Zuhro, Prof. Dr. Lili Romli, Prof. Dr. Asvi Warman Adam, Prof. Dr. Firman Noor, Drs. Hamdan Basyar M.Si., Prof. Dr. Yekti Manuati, Prof. Dr. Erwiza, Dr. Ahmad Helmy Fuadi, Drs. Fadjjar Ibnu Thufail, M.A., dan Rita Prawestri, S.E, M.A.

Saya juga tidak ingin melewatkan kesempatan baik ini dengan ucapan terima kasih kepada Drs. Josep Riwo Kaho, M.P.A. (Universitas Gadjah Mada), yang dengan kedisiplinannya yang keras sebagai dosen wali dan pembimbing S1 telah mengajarkan saya akan nilai kejujuran, kesahajaan, dan berpikir kritis. Terima kasih juga kepada Dr. Peter Lawler (Monash University) dan Dr. David Bouchier (University of Western Australia) sebagai pembimbing yang telah mengantarkan proses pencapaian pendidikan S2 dan S3 saya sebagai seorang intelektual.

Terima kasih sebesar-besarnya juga saya sampaikan kepada seluruh anggota Tim Perbatasan IPSK-LIPI, Tim RUU Perbatasan DPD RI, Tim Polugri Pusat Riset Politik-BRIN dan Tim Diaspora Pusat Riset Kewilayahan-BRIN, yang selama bertahun-tahun menjadi rekan seperjuangan dalam kegiatan penelitian dan diskusi soal isu-isu politik internasional, perbatasan, dan diaspora yang mencerahkan dan memberikan manfaat.

Sulit terbayangkan saya bisa meraih puncak karier sebagai peneliti tanpa dukungan keluarga. Rasa hormat dan terima kasih tulus diiringi rasa cinta mendalam kepada kedua orang tua saya, alm. H.W. Poerwowasito dan almh. Hj. Marjatoen, atas jasa dan limpahan kasih sayang yang telah diberikan. Demikian pula dengan ayah-ibu mertua, alm. Soehadi dan almh. Hj. Soekannah, dan kakak-kakak saya, yaitu Bambang Setiadi, D.S.Suryadi, Tri Astuti Iswandari, Widayati, alm. Budi Susilo, dan Nursari, yang

selalu mendukung dan mengasahi saya. Terima kasih yang tulus juga kepada suami tercinta, Bambang Triharyono, dan anak-anak saya, yaitu Maulana Permana Ajie, serta kembar Saffira Annisa Bening dan Nabila Annisa Harum. Rasa kasih sayang mereka yang tidak pernah pudar selalu menjadi penyemangat dan pendukung utama saya dalam menjalani karier selama ini.

Terakhir, terima kasih saya sampaikan kepada panitia penyelenggara Orasi Pengukuhan Profesor Riset dan seluruh undangan sehingga acara ini dapat terselenggara dengan lancar penuh hikmat. Dan dengan mengucapkan Alhamdulillah, saya akhiri orasi ilmiah ini. Terima kasih atas perhatian para hadirin semua dan mohon maaf atas kekurangan dan kekhilafan dalam menyampaikan orasi ilmiah ini.

Wassalaamualaikum wa rahmatullaahi wa barakaatuh

DAFTAR PUSTAKA

1. **Wuryandari G**, editor. Politik luar negeri Indonesia di tengah pusaran politik domestik. Yogyakarta: Pustaka Pelajar; 2008.
2. **Wuryandari G**, editor. Politik luar negeri Indonesia di tengah arus perubahan politik internasional. Yogyakarta: Pustaka Pelajar; 2011.
3. Elisabeth A, Alami NA, **Wuryandari G**, Muna MR, Hidayat AS, Sambodo M. Grand design kebijakan luar negeri Indonesia (2015–2025). Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia; 2016.
4. Roberts C, Habir A, Sebastian L. Indonesia's ascent: Power, leadership and regional order. London: Palgrave Macmillan; 2015.
5. **Wuryandari G**. Politik luar negeri Indonesia dalam isu keamanan non-tradisional: Tantangan dan Prospek. Dalam: Alami NA, dkk, editor. Politik Luar Negeri dan Isu-Isu Keamanan Non-Tradisional. Yogyakarta: Calpulis; 2016.
6. **Wuryandari G**. Politik luar negeri Jokowi terhadap Tiongkok. Dalam: Siswanto, **Wuryandari G**, Sriyanto N, Ramadhan M, Prabaningtyas RF. Politik Luar Negeri Indonesia terhadap Tiongkok: Memperjuangkan Kepentingan Nasional di Tengah Ketidakseimbangan Kekuatan. Jakarta: Pusat Penelitian Politik; 2016. 165–209.
7. Kementerian Luar Negeri RI. Rencana strategis kementerian luar negeri tahun 2015–2019. Jakarta: Kementerian Luar Negeri RI; 2015; Kementerian Luar Negeri RI. Rencana strategis Kementerian Luar Negeri tahun 2020–2024. Jakarta: Kementerian Luar Negeri RI; 2020.
8. Manicom J, Reeves J. Locating middle powers in international relations theory and power transitions. Dalam: Gilley B, O'Neil

- A, editors. *Middle powers and the rise of China*. Washington DC: Georgetown University Press; 2014.
9. Yamasaki M. *A study of middle power diplomacy: As a strategy of leadership and influence*. M. A., [Thesis]. Ontario, Canada: University of Waterloo; 2009.
 10. Ping JH. *Middle power statecraft: Indonesia, Malaysia and the Asia Pacific*. Dissertation, Ph.D. Adelaide: The University of Adelaide; 2003.
 11. Thies, CG & Sari, AC. *A role theory approach to middle powers: Making sense of Indonesia's place in the international system*. *Contemporary Southeast Asia* 2018; 40 (3).
 12. de Swielande, TS *Middle powers: a comprehensive definition and typology*. Dalam: de Swielande, Vandamme D, and Walton, D. et.al. (eds). *Rethinking Middle Power in the Asian Century: New Theories, New Cases*. London and New York: Routledge; 2019.
 13. Laksmana EA., *Indonesia's rising regional and global profile: does shoes really matter*. *Contemporary Southeast Asia* 2011; 33(2).
 14. Acharya A. *Indonesia matters: Asia's emerging democratic power*. Singapore: World Scientific Publishing Co.; 2014.
 15. Emmers, R & Teo, S. *Security strategies of middle powers in the Asia Pacific*. Melbourne: Melbourne University Publishing; 2018.
 16. Spero JB. *Great power security dilemmas for pivotal middle power bridging*. *Contemporary Security Policy* 2009; 30(1).
 17. **Wuryandari G**. *Human rights in Australian foreign policy with specific reference to Papua and East Timor*. Yogyakarta: Graha Ilmu; 2016.
 18. Chacko P, Willis D. *Pivoting to Indo-Pacific? The limits of Indian and Indonesian integration*. *East Asia*: Springer; 2018. 35: 133.

19. **Wuryandari G.** Kekuatan negara menengah Indonesia dan kebangkitan Tiongkok. Dalam: Makalah pada reaffirming Indonesia's foreign affairs through Airlangga International Seminar and Conference on Jokowi's Foreign Policy: Indonesia's Path toward Middle Powership; 4 November 2017; Surabaya: Universitas Airlangga.
20. **Wuryandari G.**, editor. Reformulasi kebijakan pengelolaan perbatasan di Indonesia. Yogyakarta: Pustaka Pelajar; 2018.
21. Kementerian Perdagangan. Pertumbuhan ekonomi triwulan II 2021 sebesar 7,07 persen, Mendag: Kita harus jaga momentum pertumbuhan. Siaran Pers; 6 Agustus 2021.
22. Aliabbas A., Haripin M., dan Prabawaningtyas S. Evaluasi satu dekade transformasi pertahanan di Indonesia, 2010–2019. Jakarta: Imparsial; Desember 2019.
23. The International Institute for Strategic Studies. The Military balance 2021: The annual assessment of global military capability and defence economics. London: Routledge; 2021.
24. **Wuryandari G.** Affirming Indonesian middle power and the rise of China. Makalah International Conference the Contemporary of Indonesian Studies. Guangzhou: Jinan University, School of International Studies, Academy of Overseas Chinese Studies; 21 July 2018.
25. **Wuryandari G.** Politik luar negeri Indonesia: refleksi dan prediksi 10 tahun. Jurnal Penelitian Politik. 2008; 5(1).
26. **Wuryandari G.** Hak asasi manusia, lingkungan hidup dan pelaksanaan politik luar negeri Indonesia. Dalam: Bhakti IN, editor. Isu-Isu Strategis Dalam Politik Luar Negeri Indonesia. Jakarta: PPW-LIPI; Maret 1997.
27. **Wuryandari G.** Kebijakan luar negeri dan diplomasi lingkungan hidup di Indonesia di era reformasi. Dalam: **Wuryandari G.**, editor. Politik Luar Negeri Indonesia & Isu Lingkungan Hidup. Yogyakarta: Penerbit Andi; 2015.181–240.

28. Pidato Susilo Bambang Yudhoyono. Indonesia's role as a regional and global actor. London: Wilton Park; 2012 November 2.
29. **Wuryandari G.** Kebijakan luar negeri Indonesia di Indo Pasifik di era pemerintahan Joko Widodo. Dalam: Makalah Seminar Nasional. UKSW, Salatiga; 28 November 2019.
30. **Wuryandari G.** The belt and road initiative: opportunities and challenges for enhancing bilateral relations between Indonesia and China. Proceeding International Conference The Belt & Road Initiative and Southeast Asia. In The First Penang Forum, Penang 2017: 24–26.
31. **Wuryandari G.** KTT I GNB: Peran penting negara dunia ketiga dalam tatanan dunia. Dalam: Focus Group Discussion (FGD) Pembahasan Formulir Penominasian Arsip KTT GNB I, ANRI, Jakarta, 20 September 2021.
32. Anwar, D.F. Indonesia and the ASEAN outlook on the Indo-Pacific. *International Affairs* 2020; 96(1).
33. **Wuryandari G.** Konsep negara kepulauan sebagai landasan kebijakan pembangunan di wilayah bertipologi kepulauan di Indonesia. Dalam: Makalah pada Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) DPR RI dalam Rangka Mendapatkan Masukan RUU Tentang Daerah Kepulauan. Jakarta: DPR RI; 5 Oktober 2011.
34. Kusumaningprang R. The roots and evolution of Indonesia's middle power activism. *The Indonesian Quarterly*. 2017; 45(2):152–179.
35. **Wuryandari G.** Kebijakan luar negeri Indonesia di tingkat bilateral dalam isu terorisme. Dalam: **Wuryandari G.**, editor. Politik Luar Negeri dan Isu Terorisme Internasional. Yogyakarta: Graha Ilmu; 2014. 49–76.
36. Siswanto, **Wuryandari G.**, Alami AN, Yustiningrum E, Prabaningtyas RF, Ramadhan MS. Politik luar negeri Indonesia terhadap Amerika Serikat: Mengelola hubungan di tengah perubahan tatanan global. Yogyakarta: Suluh Media; 2018.

37. **Wuryandari G.** Politik luar negeri Indonesia dan isu lingkungan hidup. *Jurnal Penelitian Politik* 8/1; 2011.
38. Visi misi program aksi Ir. H. Joko Widodo – Drs. H. M. Jusuf Kalla Pemilu Presiden dan Wakil Presiden tahun 2014. [Internet].; 2014. Diakses dari https://www.kpu.go.id/koleksigambar/Visi_Misi_JOKOWI-JK.pdf
39. **Wuryandari G.** Indonesia-India: Penguatan kerja sama politik dan keamanan. Dalam: Sriyanto N, **Wuryandari G**, Siswanto, Elisabeth A. *Indonesia sebagai Negara Kekuatan Menengah: Kajian Politik Luar Negeri Terhadap India*. Jakarta: Pusat Penelitian Politik; 2018.
40. **Wuryandari G.** Hubungan Indonesia-Amerika Serikat: Aspek pertahanan keamanan. Dalam: Inayati RS, editor. *Hubungan Indonesia-Amerika Serikat 1991–2000 (Masa Pemerintahan Presiden Clinton)*. Jakarta: PPW-LIPI; 2000.
41. Shekar V. Indian Council of World Affairs. [Internet]. [9 Desember 2018]. Diakses dari http://icwa.in/pdfs/VP_Great_V.pdf.
42. **Wuryandari G.** Masa depan ASEAN: tantangan dan peran Indonesia. Dalam Sinaga L, editor. *ASEAN 50 Tahun*. Jakarta: LIPI Press; 2018.
43. **Wuryandari G.** East Timor’s membership in ASEAN: Prospect and challenges. *ASEAN Outlook*. Taiwan: ASEAN Studies Center 2011; 8(2).
44. Tham J. *The Diplomat*. [Internet]. 2018 [3 Oktober 2018]. Diakses dari <https://thediplomat.com/2018/05/whats-in-indonesias-indo-pacific-cooperation-concept>
45. **Wuryandari G.** Hubungan bilateral Indonesia-Jepang: menuju era baru kerja sama keamanan. Dalam: Sriyanto N, **Wuryandari G**, Siswanto, Elisabeth. A, editors. *Indonesia sebagai Negara Kekuatan Menengah: Kajian Politik Luar Negeri terhadap Jepang*. Jakarta: Pusat Penelitian Politik; 2017.

46. **Wuryandari G.** The Prospects of Indonesia–China relations. Dalam: Sinaga LC, editor. Six Decades of Indonesia-China Relations. Singapore: Springer; 2018.
47. Flake G, Fang X. MIKTA: The Search for rationale. Perth: USAsia Centre; January 2017.

Buku ini tidak diperjualbelikan.

DAFTAR PUBLIKASI ILMIAH

Buku

Bahasa Inggris

1. **Wuryandari G.** A case of forgive and forget? Human Rights in Australian Foreign Policy in East Timor and Papua. Yogyakarta: Graha Ilmu; 2016.

Bahasa Indonesia

2. **Wuryandari G**, Samego I, Basyar H, dkk. Modul pencegahan terorisme. Jakarta: BNPT; 2018.
3. Elisabeth A, Alami NA, **Wuryandari G**, dkk. Grand design kebijakan luar negeri Indonesia (2015–2025). Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia; 2016.
4. Bhakti IN, **Wuryandari G**, Muna MR. Pemeliharaan keamanan Republik Indonesia – Australia, kaitannya dengan stabilitas dan keamanan regional Asia Tenggara suatu tinjauan strategis politis. Jakarta: PPW-LIPI dan Baltibang Deplu RI, 1997.
5. Adil H, Djiwandono S, Bhakti IB, **Wuryandari G**, dkk. Perkembangan kawasan Pasifik Selatan dan implikasinya terhadap Indonesia: Kerja sama regional negara-negara kawasan Pasifik Selatan. Jakarta: Pusat Penelitian dan Pengembangan Kemasayarakatan dan Kebudayaan, LIPI; 1996.
6. Sihbudi R, **Wuryandari G**, Elisabeth A. PDI dan prospek pembangunan politik. Jakarta: Grasindo; 1991.

Bagian dari Buku

Bahasa Inggris dan lainnya

7. Sriyanto N, **Wuryandari G.** Ibukota baru Indonesia: Sudut pandang politik luar negeri dan geopolitik. Dalam: Gulasan A, Maraining A, Dollah R, Radzi MM, editor. Perpindahan Ibu Kota Indonesia ke Kalimantan. Kinibalu: Penerbit Universiti Malayasia Sabah; 2021.

8. **Wuryandari G.** The Prospects of Indonesia–China relations. Dalam: Sinaga LC, editor. *Six Decades of Indonesia-China Relations*. Singapore: Springer; 2018.
9. **Wuryandari G.** The Dynamics of Vietnam-China border relations: From Enmity to Friendship. In Wiratri A. *Transnational Migration and Diaspora in Border Cities in Southeast Asia: Case Study of Vietnam-China Border in Mong Cai*. Jakarta: Research Center for Regional Resources; 2018.
10. **Wuryandari G.** Foreign policy and energy security issues in Indonesia. In Alami AN, **Wuryandari G**, Yustiningrum E, Sriyanto N. *Understanding Indonesia’s Foreign Policy on Energy Security Issues*. Singapore: Springer; 2017.

Bahasa Indonesia

11. **Wuryandari G**, Sinaga L.C. Hubungan antarwarga dalam relasi Indonesia-Tiongkok di tengah perubahan politik domestik. Dalam: Yuniarto, P.R, Julan T, editor. *Ragam dan Prospek Hubungan Antararga Indonesia-Tiongkok*. Surabaya: Airlangga University Press; 2021.
12. **Wuryandari G.** Prakarsa strategi optimalisasi diaspora akademisi dan profesional Indonesia di Malaysia. Dalam: Lamijo, Sari BR, Maunati Y, Wuryandari G. *Brain Drain atau Brain Gain? Jaringan Diaspora Akademisi dan Profesional Indonesia di Malaysia*. Yogyakarta: Ombak; 2020.
13. **Wuryandari G.** Pasang surut hubungan Indonesia-Amerika Serikat di era sebelum reformasi. Dalam: Siswanto, **Wuryandari G.**, Alami AN, Yustiningrum E, Prabaningtyas RF, Ramadhan MS. *Politik Luar Negeri Indonesia Terhadap Amerika Serikat: Mengelola Hubungan di Tengah Perubahan Tatanan Global*. Yogyakarta: Suluh Media; 2018.
14. **Wuryandari G.** Menelaah problematika pengelolaan perbatasan Indonesia. Dalam: **Wuryandari G**, editor. *Reformulasi Kebijakan Pengelolaan Perbatasan di Indonesia*. Jakarta: Pustaka Pelajar; 2018.

15. **Wuryandari G.** Arah dan strategi kebijakan pengelolaan perbatasan di Indonesia. Dalam: **Wuryandari G**, editor. Reformulasi Kebijakan Pengelolaan Perbatasan di Indonesia. Yogyakarta: Pustaka Pelajar; 2018.
16. **Wuryandari G.** Prasyarat yang dibutuhkan. Dalam: **Wuryandari G**, editor. Reformulasi Kebijakan Pengelolaan Perbatasan di Indonesia. Yogyakarta: Pustaka Pelajar; 2018.
17. **Wuryandari G.** Indonesia-India: Penguatan kerja sama politik dan keamanan. Dalam: Sriyanto N, **Wuryandari G**, Siswanto, Elisabeth A. Indonesia sebagai Negara Kekuatan Menengah: Kajian Politik Luar Negeri Terhadap India. Jakarta: Pusat Penelitian Politik; 2018.
18. **Wuryandari G.** Masa depan ASEAN: Tantangan dan peran Indonesia. Dalam: Sinaga LC, editor. 50 Tahun ASEAN. Jakarta: LIPI Press; 2018.
19. **Wuryandari G.** Pengelolaan kedaulatan negara dalam konteks pertahanan di perbatasan RI-Malaysia. Dalam: Noveria M. Kedaulatan Indonesia di Wilayah Perbatasan Perspektif Multidimensi Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia; 2017.
20. **Wuryandari G.** Dinamika demokrasi dan sistem pemilu di Timor Leste. Dalam: Sinaga LC, dkk, editor. Praktik Demokrasi dan Pemilihan Umum di Berbagai Negara. Tangerang: Mahara Publishing; 2017.
21. **Wuryandari G.** Pemilu parlemen dan pemilu Presiden di Venezuela. Dalam: Kartini I, dkk, editor. Format Sistem Pemilu Presiden di Filipina, Korea Selatan, Venezuela dan Amerika Serikat. Tangerang: Mahara Publishing; 2017.
22. **Wuryandari G.** Hubungan bilateral Indonesia-Jepang: Menuju era baru kerja sama keamanan. Dalam: Nanto Sriyanto, **Wuryandari G**, Siswanto, Prabaningtyas RF, Ramadhan MS. Indonesia Sebagai Negara Kekuatan Menengah: Kajian Politik Luar Negeri terhadap Jepang. Jakarta: Pusat Penelitian Politik; 2017.

23. **Wuryandari G.** Politik luar negeri Jokowi terhadap Tiongkok. Dalam: Siswanto, **Wuryandari G**, Sriyanto N, Ramadhan MS, Prabaningtyas RF. Politik Luar Negeri Indonesia Terhadap Tiongkok: Memperjuangkan Kepentingan Nasional di Tengah Ketidakseimbangan Kekuatan. Jakarta: Pusat Penelitian Politik; 2016.
24. **Wuryandari G.** Perdagangan Perempuan dan politik luar negeri Indonesia. Dalam: Alami AN, dkk, editor. Perempuan dan Globalisasi: Studi Kasus Trafficking di Kabupaten Karawang. Tangerang: Mahara Publishing; 2016.
25. **Wuryandari G.** Politik luar negeri Indonesia dalam isu keamanan non-tradisional: tantangan dan prospek. Dalam: Alami NA, dkk, editor. Politik Luar Negeri dan Isu-Isu Keamanan Non-Tradisional. Yogyakarta: Calpulis; 2016.
26. **Wuryandari G.** Diplomasi bilateral Indonesia dalam isu pekerja migran. Dalam: Yustiningrum E, Sriyanto N, dkk, editor. Politik Luar Negeri Indonesia dan Isu Migrasi Internasional. Yogyakarta: Graha Ilmu; 2016.
27. **Wuryandari G.** Kiprah politik luar negeri dalam isu keamanan energi. Dalam: Alami NA, editor. Politik Luar Negeri Indonesia dan Isu Keamanan Energi. Jakarta : LIPI Press; 2015.
28. **Wuryandari G**, Alami NA. Menuju politik luar negeri yang peduli lingkungan hidup: Suatu pengantar. Dalam: **Wuryandari G**, editor. Politik Luar Negeri dan Isu Lingkungan Hidup. Yogyakarta: Andi; 2015.
29. **Wuryandari G.** Kebijakan luar negeri dan diplomasi lingkungan hidup di Indonesia di era reformasi. Dalam: **Wuryandari G**, editor. Politik Luar Negeri Indonesia dan Isu Lingkungan Hidup. Yogyakarta: Andi; 2015.
30. **Wuryandari G.** Merajut asa pengembangan wilayah di Nusa Tenggara Timur. Dalam: **Wuryandari G**, editor. Pengembangan Wilayah Nusa Tenggara Timur dari Perspektif Sosial: Analisis Pelaksanaan Kebijakan. Yogyakarta: Graha Ilmu; 2015.
31. **Wuryandari G.** Pengembangan wilayah Nusa Tenggara Timur dari perspektif politik: Implementasi kebijakan. Dalam:

- Wuryandari G**, editor. Pengembangan Wilayah Nusa Tenggara Timur dari Perspektif Sosial: Analisis Pelaksanaan Kebijakan. Yogyakarta: Graha Ilmu; 2015.
32. **Wuryandari G**, Soekarni M. Jalan menuju percepatan pengembangan wilayah Nusa Tenggara Timur: Sebuah keharusan. Dalam: **Wuryandari G**, editor. Pengembangan Wilayah Nusa Tenggara Timur dari Perspektif Sosial: Analisis Pelaksanaan Kebijakan. Yogyakarta: Graha Ilmu; 2015.
 33. **Wuryandari G**. Nusa Tenggara Timur dan pengembangan wilayah: Suatu pengantar. Dalam: **Wuryandari G**, editor. Pengembangan Wilayah Nusa Tenggara Timur dari Perspektif Sosial: Permasalahan dan Kebijakan. Jakarta: LIPI Press; November 2014.
 34. **Wuryandari G**, Zaenudin D, Patji AR. Pengembangan wilayah dalam perspektif teoritik. **Wuryandari G**, editor. Pengembangan Wilayah Nusa Tenggara Timur dari Perspektif Sosial: Permasalahan dan Kebijakan. Jakarta: LIPI Press; November 2014.
 35. **Wuryandari G**. Pengembangan wilayah Nusa Tenggara Timur: Perspektif politik. Dalam: **Wuryandari G**, editor. Pengembangan Wilayah Nusa Tenggara Timur dari Perspektif Sosial: Permasalahan dan Kebijakan. Jakarta: LIPI Press; November 2014.
 36. **Wuryandari G**. Kebijakan luar negeri Indonesia di tingkat bilateral dalam isu terorisme. Dalam: **Wuryandari G**, editor. Politik Luar Negeri Indonesia dan Isu Terorisme Internasional. Yogyakarta: Graha Ilmu; 2014.
 37. **Wuryandari G**. Indonesia dan isu terorisme: Perlunya upaya terus membangun kerjasama internasional dan soft power. Dalam: **Wuryandari G**, editor. Politik Luar Negeri Indonesia dan Isu Terorisme Internasional. Yogyakarta: Graha Ilmu; 2014.
 38. **Wuryandari G**. Prospek hubungan Indonesia-China. Dalam: Sinaga LC, editor. Hubungan Indonesia-Cina dalam Dinamika Politik, Pertahanan-Kemampuan, dan Ekonomi di Asia Tenggara. Jakarta: LIPI Press; 2013.

39. **Wuryandari G.** Peluang dan kendala pembangunan ekonomi di perbatasan. Dalam: Sitohang J, Rahman AR, Adam AW, **Wuryandari G**, Yustiningrum E. Pembangunan Ekonomi Daerah Perbatasan Sulawesi Utara: Kaitan Kawasan Perbatasan Miangas. Jakarta: Pusat Penelitian Politik; 2012.
40. **Wuryandari G.** Indonesia dan dinamika perkembangan internasional: Suatu pengantar. Dalam: **Wuryandari G**, editor. Politik Luar Negeri Indonesia di Tengah Arus Perubahan Politik Internasional. Yogyakarta: Pustaka Pelajar; Maret 2011.
41. **Wuryandari G.** Sriyanto N. Tatanan hubungan internasional pasca perang dingin. Dalam: **Wuryandari G**, editor. Politik Luar Negeri Indonesia di Tengah Arus Perubahan Politik Internasional. Yogyakarta: Pustaka Pelajar; Maret 2011.
42. **Wuryandari G.** Pendahuluan. Dalam: **Wuryandari G**, editor. Format Baru Politik Luar Negeri Indonesia. Jakarta: Pusat Penelitian Politik; 2009.
43. **Wuryandari G.** Politik luar negeri Indonesia dan restrukturisasi kelembagaan. Dalam: **Wuryandari G**, editor. Format Baru Politik Luar Negeri Indonesia. Jakarta: Pusat Penelitian Politik; 2009.
44. **Wuryandari G.** Tetangga baru masalah baru. Dalam: **Wuryandari G**, editor. Keamanan di Perbatasan Indonesia-Timor Leste: Sumber Ancaman dan Kebijakan Pengelolaannya. Yogyakarta: Pustaka Pelajar; 2009.
45. **Wuryandari G.** Keamanan perbatasan: Kajian teoritis. Dalam: **Wuryandari G**, editor. Keamanan di Perbatasan Indonesia-Timor Leste: Sumber Ancaman dan Kebijakan Pengelolaannya. Yogyakarta: Pustaka Pelajar; 2009.
46. **Wuryandari G.** Arti strategis perbatasan Indonesia-Timor Leste. Dalam: **Wuryandari G**, editor. Keamanan di Perbatasan Indonesia-Timor Leste: Sumber Ancaman dan Kebijakan Pengelolaannya. Yogyakarta: Pustaka Pelajar; 2009.
47. **Wuryandari G.** Persoalan demarkasi dan keamanan Indonesia-Timor Leste. Dalam: **Wuryandari G**, editor. Keamanan di Perbatasan Indonesia-Timor Leste: Sumber Ancaman dan Kebijakan Pengelolaannya. Yogyakarta: Pustaka Pelajar; 2009.

48. **Wuryandari G**, Noor F. Implikasi kebijakan pengelolaan keamanan di perbatasan RI-Timor Leste. Dalam: **Wuryandari G**, editor. Keamanan di Perbatasan Indonesia-Timor Leste: Sumber Ancaman dan Kebijakan Pengelolaannya. Yogyakarta: Pustaka Pelajar; 2009.
49. **Wuryandari G**, Noor F, Hadiwinata BS. Road Map menuju terwujudnya keamanan komprehensif di perbatasan di Perbatasan Indonesia-Timor Leste. Dalam: **Wuryandari G**, editor. Keamanan di Perbatasan Indonesia-Timor Leste: Sumber Ancaman dan Kebijakan Pengelolaannya. Yogyakarta: Pustaka Pelajar; 2009.
50. **Wuryandari G**. Dinamika politik domestik dalam politik luar negeri Indonesia pada masa orde lama. Dalam: **Wuryandari G**, editor. Politik Luar Negeri Indonesia di Tengah Pusaran Politik Domestik. Yogyakarta: Pustaka Pelajar; Agustus 2008.
51. **Wuryandari G**. Politik luar negeri dan faktor domestik. Dalam: **Wuryandari G**, editor. Politik Luar Negeri Indonesia di Tengah Pusaran Politik Domestik. Yogyakarta: Pustaka Pelajar; Agustus 2008.
52. **Wuryandari G**. Indonesia dalam kebijakan luar negeri dan pertahanan Australia 1996-2001. Dalam: **Wuryandari G**, editor. Gaya dan Substansi Politik Luar Negeri Australia 1996–2001. Jakarta: P2P-LIPI; 2001.
53. **Wuryandari G**, Sungkar Y. Inisiatif e-ASEAN dan implikasinya. Dalam: Arbi Z, editor. ASEAN Menyambut Era Digital. Jakarta: P2P-LIPI, Desember 2001.
54. **Wuryandari G**. Regionalisme ekonomi di Asia-Pasifik: perspektif Indonesia. Dalam: Irawati A, editor. Regionalisme Ekonomi di Asia Pasifik: Perspektif Indonesia. Jakarta: PPW-LIPI; Maret 2000.
55. **Wuryandari G**. Pendahuluan. Dalam: **Wuryandari G**, editor. Menuju ASEAN Vision 2020: Tantangan dan Inisiatif. Jakarta: PPW-LIPI; Desember 2000.

56. **Wuryandari G.** ASEAN dan tantangan kerjasama di bidang politik. Dalam: **Wuryandari G.**, editor. Menuju ASEAN Vision 2020: Tantangan dan Inisiatif. Jakarta: PPW-LIPI; Desember 2000.
57. **Wuryandari G.** Masa depan ASEAN. Dalam: **Wuryandari G.**, editor. Menuju ASEAN Vision 2020: Tantangan dan Inisiatif. Jakarta: PPW-LIPI; Desember 2000.
58. **Wuryandari G.** Hubungan Indonesia-Amerika Serikat: Aspek pertahanan keamanan. Dalam: Inayati RS, editor. Hubungan Indonesia-Amerika Serikat 1991-2000 (Masa Pemerintahan Presiden Clinton). Jakarta: PPW-LIPI; 2000.
59. **Wuryandari G.** Implikasi kebijakan ekonomi Jepang terhadap Indonesia. Dalam: Irawati A, editor. Implementasi Kebijakan Keamanan Ekonomi Jepang terhadap Krisis di Asia Timur: Hubungan Jepang-Indonesia. Jakarta: PPW-LIPI; 1999..
60. **Wuryandari G.** Genealogi konflik Timor Timur. Dalam: Muna MR. Agenda Kebijakan Luar Negeri RI Memasuki Abad 21: Fokus Timor Timur. Jakarta: PPW-LIPI; 1999.
61. **Wuryandari G.** Kendala yang dihadapi politik luar negeri Indonesia. Dalam: Inayati RS, Muna MR, editor. Peluang dan Kendala Politik Luar Negeri RI. Jakarta: PPW-LIPI; 1998.
62. **Wuryandari G.** Kebijakan keamanan AS periode perang dingin. Dalam Awani Irewati, editor. Kebijakan Keamanan AS Tahun 1990-an: Implementasinya terhadap Politik Keamanan di Asia Pasifik. Jakarta: PPW-LIPI; 1998.
63. **Wuryandari G.** Hak Asasi Manusia, lingkungan hidup dan pelaksanaan politik luar negeri Indonesia. Dalam: Bhakti IN, editor. Isu-Isu Strategis Dalam Politik Luar Negeri Indonesia. Jakarta: PPW-LIPI; Maret 1997.
64. **Wuryandari G.** Investasi negara-negara APEC di Indonesia. Dalam: Bhakti IN, editor. Indonesia dan APEC Dalam Perkembangan Ekonomi Politik Internasional. Jakarta: PPW-LIPI; Maret 1997.

65. **Wuryandari G.** Peluang dan kendala bagi usaha kecil dan menengah. Dalam: Bhakti IN, editor. Indonesia & APEC. Jakarta: PPW-LIPI; 1996.
66. **Wuryandari G.** Pemetaan kekuatan negara-negara besar di Asia Pasifik. Dalam: Bhakti IN, editor. Hubungan Politik dan Keamanan Negara-Negara Besar di Asia Pasifik dengan ASEAN Pasca Perang Dingin. Jakarta: PPW-LIPI; 1995.
67. **Wuryandari G.** Partisipasi politik ormas pemuda pasca undang-undang No. 8/1985. Dalam: Ambong I. Perkembangan Budaya Politik Indonesia: Partisipasi dan Disiplin Sosial di Kalangan Generasi Muda. Jakarta: PPW-LIPI; 1990.

Jurnal Internasional

68. Sari BR, Maunati Y, **Wuryandari G**, Lamijo. The widening global network of Indonesian diaspora scholars in Malaysia. *Diaspora Studies* 2022; 1-25. <https://doi.org/10.1163/09763457-20221004>
69. **Wuryandari G.** Indonesian diplomacy in the digital world. *Su-vannabhumi Journal* 2017; 9(2).
70. **Wuryandari G.** East Timor's membership in ASEAN: Prospect and challenges. *ASEAN Outlook* 2011; 8(2). Taiwan; 2011.
71. **Wuryandari G.** Australia-Indonesia relations in the period of the Indonesian new order government. *The Indonesian Quarterly* 1995; XXIII(2) 2nd Quarter.

Jurnal Nasional

72. **Wuryandari G.** Raharjo S.N.I. The existence of "Sapi-Pisang" People: Challenges and opportunities for Indonesia-Philippines Border Area Development. *Jurnal Kajian Wilayah* 2019; 10(2).
73. **Wuryandari G.** Politik luar negeri Indonesia menjawab ancaman keamanan non-tradisional. *Jurnal Penelitian Politik*; 2016.

74. **Wuryandari G.** Politik luar negeri Indonesia dalam menghadapi isu terorisme internasional. *Jurnal Penelitian Politik*; 2014.
75. **Wuryandari G.** “Menerobos Batas” nelayan Indonesia di perairan Australia: Permasalahan dan prospek. *Jurnal Penelitian Politik* 2014; 11(1).
76. **Wuryandari G.** Politik luar negeri Indonesia dan isu lingkungan hidup. *Jurnal Penelitian Politik* 2011; 8(1).
77. **Wuryandari G.** Menelaah politik luar negeri Indonesia dalam menyikapi isu perdagangan manusia. *Jurnal Penelitian Politik* 2011; 8(2).
78. **Wuryandari G.** Pembangunan wilayah perbatasan menuju keamanan komprehensif. *Masyarakat Indonesia* 2009; XXXV(2).
79. **Wuryandari G.** Politik luar negeri Indonesia: refleksi dan prediksi 10 tahun. *Jurnal Penelitian Politik* 2008; 5(1).
80. **Wuryandari G.** Human rights in Australian foreign policy. *Masyarakat Indonesia* 2007; 33(1).
81. **Wuryandari G.** Prospek masa depan Timor-Timur. *Jurnal Masyarakat dan Budaya* 1999; II(2).
82. **Wuryandari G.** Australia: Dari monarki ke republik? *Jurnal Marege* 1999; II(2).
83. **Wuryandari G.** Hak Asasi Manusia dan politik luar negeri Indonesia. *Jurnal Analisis CSIS* 1999; XXVIII(2).
84. **Wuryandari G.** Liberalisasi perdagangan dan investasi APEC 2010: Peluang dan kendala usaha kecil menengah. *Jurnal Analisis CSIS* 1997; XXVI(3).
85. **Wuryandari G.** Analisis kebijakan luar negeri Australia terhadap Indonesia. *Jurnal Informasi Strategis* 1996; II(3).
86. **Wuryandari G.** Indonesia dan APEC: Profil Indonesia. *Jurnal CIDES* 1996; 2.
87. **Wuryandari G.** Pembangunan, demokrasi dan otoritarian: Suatu hubungan kausalitas? *Jurnal Ilmu Politik* No 15, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.

88. **Wuryandari G.** Partai Demokrasi Indonesia dan Pemilihan Umum 1992. *Jurnal Ilmu Politik* 1991; 9.
89. **Wuryandari G.** Memahami komunikasi politik di Indonesia. *Jurnal Ilmu Politik* 1990; 10.
90. **Wuryandari G.** Suatu tinjauan tentang peran politik mahasiswa. *Jurnal Ilmu Politik* 1989; 6.

Naskah Kebijakan

91. **Wuryandari G,** Sari BR, Maunati Y, Lamijo, Fuady AH, Bismoko AB, Mulyasari PN, Mudzakir A. Strategi meningkatkan efektifitas Kartu Masyarakat Indonesia di luar negeri (KMILN). Policy Paper. Jakarta: Pusat Riset Kewilayahan-BRIN; 2021.
92. **Wuryandari G,** Sari BR, Maunati Y, Lamijo, Gusnelly, Lissandhi AN, Thufail F, Fuady AH, Aidulsyah F, Sari M, Mulyasari PN. Mendefinisikan Diaspora Indonesia. Policy Paper. Jakarta: P2W-LIPI; 2019.
93. **Wuryandari G,** Soekarni M, Noveria M, Hasyim MN, Lamijo. Reformulasi pengelolaan perbatasan di Indonesia. Policy Paper. Jakarta: IPSK-LIPI; 2017.
94. **Wuryandari G,** Suratman E, Samego I, Muchlis, Widodo. Pengelolaan perbatasan dalam konteks UU No 43 Tahun 2008 wilayah negara. Position Paper. Jakarta: DPD RI; 2016.
95. Noveria M, **Wuryandari G,** Manuati Y, Siburian R, Setiawan B, Soekarni M. Perdagangan barang dan orang melintasi wilayah perbatasan Kalimantan dan Malaysia. Policy Paper. Jakarta: Kedeputian IPSK-LIPI; 2015.
96. Noveria M, **Wuryandari G,** Habba J, Pamungkas C, Nadjib M, Setiawan B, Yuliana CI, Sudiyono. Kedaulatan negara dipertahankan di wilayah perbatasan laut. Policy Paper. Jakarta: Pusat Penelitian Kependudukan (P2KK)-LIPI; 2015.
97. Alami AN, **Wuryandari G,** Siswanto, Ramadhan M, Prabaningtyas RF. Politik luar negeri dan keamanan non-tradisional. Policy Paper. Jakarta: P2P-LIP; 2015.

98. **Wuryandari G**, Setiawan B, Soekarni M, Zaenuddin D, and Patji AR. Memacu percepatan pembangunan wilayah Nusa Tenggara Timur Berbasis Kemaritiman. Policy Paper. Jakarta: IPSK- LIPI; 2013.
99. Noveria M, **Wuryandari G**, Manuati Y, Soekarni M, Setiawan B, and Siburian R. Perdagangan barang dan orang melintasi wilayah perbatasan Kalimantan dan Malaysia. Policy Paper. Jakarta: IPSK LIPI; 2012.

Prosiding Internasional

100. **Wuryandari G**. Indonesian middle power and the rise of China. Proceeding International Symposium on Contemporary Indonesian Studies. Jinan University, Guangzhou; 20-22 July 2018.
101. **Wuryandari G**. The belt and road initiative: opportunities and challenges for enhancing bilateral relations between Indonesia and China. Proceeding International Conference The Belt & Road Initiative and Southeast Asia. In The First Penang. Penang, Malaysia; March 2017 p. 24–26.
102. **Wuryandari G**. Indonesia-Timor Leste's Border disputes: The Untackle Questions. Proceeding International Seminar Socio-Political and Economic Reform in Southeast Asia: Assessments and the Way Forward, LIPI and CSEAS Kyoto University, JSPS. Jakarta; 9-12 March 2013.

DAFTAR PUBLIKASI LAINNYA

Makalah Internasional

1. **Wuryandari G.** Indonesian foreign policy in Indo Pacific. The 1st Universitas Pelita Harapan International Relations Conference on Indo-Pacific: Outlook, Opportunities, and Challenges. Jakarta; 4-5 December 2020.
2. **Wuryandari G.** Integration of energy in ASEAN. International Seminar on Towards Regional Energy Resilience, Universitas Pertamina. Jakarta; 10 November 2020.
3. **Wuryandari G.** Cross border conflict prevention in Indonesia through enhancing local people early warning system. ASEAN Regional Forum (ARF) Seminar on Preventive Diplomacy and Conflict Mitigation; 8-9 December and 15-16 December 2020.
4. **Wuryandari G.** Navigating Indonesia's diaspora: Lesson learnt of India and China. IFSSO International Conference. Sanliurfa, Turkey; 4 – 5 November 2019.
5. **Wuryandari G.** From enmity to friendship: Fostering economic relations between Indonesia and East Timor. Asia Pacific Peace Research Association (APPRA) International Conference. Jakarta; 2-3 May 2019.
6. **Wuryandari G.** The future trajectory of Indonesia's foreign policy challenges in the Indo-Pacific. Asia Pacific Conference I: Indo-Pacific and Beyond". International Relations Study Program of Kristen University and Research Center for Regional Resources (P2SDR)-LIPI. Jakarta; 20 February 2019.
7. **Wuryandari G.** Enhancing people to people connectivity between South Korea and Indonesia: Lesson learnt from GTE in Indonesia. Proceeding the 1st International Conference for the CORE Project Group of Busan University of Foreign Studies Intercultural Communication and Foreign Language Education. Busan; 29–30 November 2018.

8. **Wuryandari G**, Rahardjo SI. “Sapi/Pisang” People, crossing-border and implications for Indonesian-Philippines border Cooperation. Proceedings IFSSO International Conference Global Connectivity: Cross Cultural Connections, Social Inclusion, and Recognition: The Role of Social Sciences. IFSSO, Denpasar; September 2017.
9. **Wuryandari G**. Navigating Indonesian diplomacy in the digital world. Proceeding International Conference of ISEAS/BUFS Locating Cultural Characteristics of Southeast Asia as a Whole. Busan University of Foreign Studies, Busan, Korea; 26 May 2017.
10. **Wuryandari G**. The role of area studies for diplomatic works. The 1st International Conference on Social Sciences and Humanities (ICSSH), IPSK-LIPI, Jakarta; 20 Oktober 2016.
11. **Wuryandari G**. The conflict of crossing border: Indonesia's traditional fisherman to Australian waters. Proceeding the Asia-Pacific Peace Research Association (APPRA) Conference Pathways Towards Just Peace: Reinventing Security, Justice and Democracy in Asia-Pacific. Kathmandu, Nepal; 9–11 October 2015.
12. **Wuryandari G**. Regional security issues challenges from Indonesia perspective. The Third Annual Asia Century Future Initiative: Australia-Indonesia Dialogue on Australia-Indonesia Relations, Griffith University, Brisbane, Queensland; 8–10 September 2015.
13. **Wuryandari G**. Australia-Indonesia: time to change. Panel Discussion Jakarta Foreign Correspondent Club (JFCC). Jakarta; 7 December 2015.
14. **Wuryandari G**. The border and it's role in the T.I.A growth triangles: An Indonesian perspective. Trilateral Workshop Timor Leste, Indonesia, Australia Growth Triangle (TIA-GT). Dili; 14–15 July 2014.
15. **Wuryandari G**. Timor Leste’s readiness in facing ASEAN community. Roundtable Discussion BPPK, Department of foreign Affairs. Jakarta; 1 May 2009.

16. **Wuryandari G.** Timor Leste's experiment with democracy: The problem of democratic institutions and civil unrest. International Workshop, Konrad Adenauer Stiftung dan UNPAR, Bandung; 15–17 January 2008.
17. **Wuryandari G.** The Papua's separatist conflict: Canberra's perception and policy. Seminar of the Association of Indonesian Post-Graduate Students and Scholars in Australia (AIPSSA). Perth; 29 April 2006.
18. **Wuryandari G.** Australia and Human Rights in Papua: A case of forgive and forget? Australian Political Studies Association (APSA) Annual Conference University of Otago, Otago. New Zealand; 28–30 September 2005.
19. **Wuryandari G.** The Howard Government and Papua. Australian Studies Symposium, the Institute of Advanced Studies, the University of Western Australia (UWA). Perth; 5 November 2004.
20. **Wuryandari G.** Papua: Unfinished Conflict. Colonialism and Its Aftermath-An Interdisciplinary International Conference. University of Tasmania, Hobart; 23–25 June 2004.
21. **Wuryandari G.** Recent political developments in Papua. Asian Studies Seminar Series, the University of Western Australia; Perth; 7 Mei 2004.
22. **Wuryandari G.** Indonesia's strategy in managing Papua separatism. Indonesian Open Conference Australian National University; Canberra; 29–30 September 2003.
23. **Wuryandari G.** Human Rights in Australian Foreign Policy with specific reference to West Papua and East Timor. Workshop Series Asian Studies Postgraduate, the University of Western Australia. Perth; 2002.
24. **Wuryandari G.** Indonesia – Australia relations: Indonesian – View. The Second Indonesia-Australia Security Forum (IASFOR) Meeting. Thredbo, New South Wales; 22–24 November 2000.

25. **Wuryandari G.** Japan's place in the Asia-Pacific region: A time to rethinking? Unpublished Research Report for Japan Society for the Promotion of Science (JSPS), International University of Japan. Niigata, Japan; 12 March 2000.

Makalah Nasional

26. **Wuryandari G.** Rencana aksi kolaboratif untuk visi pelibatan diaspora dalam pembangunan Indonesia 2030. High Level Multi Stakeholder Dialogue on Diaspora Engagement for Indonesian Development: Diaspora Card Enhancement and 2030 Visions of the Diaspora Engagement. Collective Leadership Specialists Indonesia (CLSI) dan GIZ (Program Migration & Diaspora). Bandung–Jakarta; 7–8 Oktober 2021.
27. **Wuryandari G.** KTT I GNB: Peran penting negara dunia ketiga dalam tatanan dunia. Focus Group Discussion (FGD) Pembahasan Formulir Penominasian Arsip KTT GNB I, ANRI. Jakarta; 20 September 2021.
28. **Wuryandari G.** Kerjasama internasional keantariksaan untuk pembangunan nasional berkelanjutan. Seminar Nasional Kebijakan Penerbangan dan Antariksa yang ke-VI (Sinan KPA-VI) Tema “Diplomasi Keantariksaan Sebagai Instrumen Untuk Menuju Pencapaian Pembangunan Indonesia Yang Berkelanjutan”. Jakarta; 15–16 September 2021.
29. **Wuryandari G.** Geopolitik dan pertahanan peralihan ibu kota baru di Kalimantan. Webinar Series the Indonesian Democracy Initiative (TIDI) mengenai Pemindahan Ibu Kota Negara Republik Indonesia. Jakarta; 2 Agustus 2021.
30. **Wuryandari G.** Kerja sama Selatan-Selatan dan manfaatnya untuk Indonesia. FGD Departemen HI FISIP UI, Reposisi Indonesia dalam Perubahan Lingkungan Strategis Regional dan Global: Kepemimpinan Indonesia dalam Kerja Sama Selatan-Selatan untuk Pembangunan Berkelanjutan. Depok; 30 April 2021.

31. **Wuryandari G.** Science diplomacy dan peningkatan peran Indonesia di tingkat global. Focus Group Discussion (FGD) dalam rangka penguatan program PRN melalui Kerjasama Indonesia dengan Diaspora Indonesia di United Kingdom, Ristek-BRIN. Jakarta; 20 Januari 2021.
32. **Wuryandari G.** Pembangunan ekonomi di kawasan perbatasan Aruk, Montaaïn dan Skouw. Diskusi Percepatan Pembangunan Ekonomi di Kawasan Perbatasan Aruk, Montaaïn dan Skouw. Diskusi Terbatas Kementerian Koordinator di Bidang Politik dan Keamanan. Bogor; 27 Agustus 2020.
33. **Wuryandari G.** Strategi peningkatan kerja sama Indonesia-Ekuador. Diskusi Terbatas BPPK, Kementerian Luar Negeri RI, Jakarta; 28 April 2020.
34. **Wuryandari G.** Dinamika dan potensi ekonomi kawasan perbatasan Indonesia dan Filipina. FGD Persiapan Substansi Pra-Kunjungan Panel of Experts terkait Revitalisasi Konektivitas Bisnis. BPPK Kementerian Luar Negeri RI. Jakarta; 4 Februari 2020
35. **Wuryandari G.** Kebijakan luar negeri indonesia di Indo Pasifik di era pemerintahan Joko Widodo. Seminar Nasional. UKSW. Salatiga; 28 November 2019.
36. **Wuryandari G.** Penanggulangan terorisme di Indonesia. Kegiatan Penguatan Aparatur Kelurahan dan Desa dalam Pencegahan Terorisme melalui FKPT diselenggarakan oleh BNPT. Bombana, Sulawesi Tenggara; 29 Agustus 2018.
37. **Wuryandari G.** Gerakan Non-Blok (GNB) dan warisannya kepada dunia. Workshop Warisan Dokumenter Indonesia Untuk Pengetahuan Dunia diselenggarakan oleh LIPI. Jakarta; 17–18 April 2018.
38. **Wuryandari G.** Penyediaan infrastruktur PUPR mendukung optimalisasi PLBN sebagai pengungkit pertumbuhan ekonomi kawasan perbatasan. Diskusi Teknis Kawasan Perbatasan: Antara Harapan dan Kenyataan oleh Kementerian PUPR. Jakarta; 21 November 2017.

39. **Wuryandari G.** Kekuatan negara menengah Indonesia dan kebangkitan Tiongkok. International Seminar and Conference 2017 (Renaissance) diselenggarakan oleh Universitas Airlangga. Surabaya; 4 November 2017.
40. **Wuryandari G.** Konsep desain infrastruktur pelayanan dasar di kawasan perbatasan: Sebuah pemikiran awal. Rapat Kebijakan Program DAK Afirmasi di Kawasan Perbatasan Tahun 2018, diselenggarakan Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP). Bandung; 12–15 April 2017.
41. **Wuryandari G.** Pembangunan dan pengelolaan perbatasan Indonesia-Malaysia pada Era Presiden Joko Widodo: Studi di Propinsi Kalimantan Barat dan Kalimantan Utara. Diskusi Kepakaran oleh Pusat Penelitian Badan Keahlian DPR. Jakarta; 6 April 2017.
42. **Wuryandari G.** Peningkatan ketahanan sosial pada masyarakat pulau-pulau kecil perbatasan melalui optimalisasi kerja sama lintas batas. Seminar Hasil Akhir Kegiatan Unggulan LIPI. Jakarta; 6 Desember 2016.
43. **Wuryandari G.** Politik luar negeri Indonesia terhadap Tiongkok di tengah ketidakseimbangan kekuatan. Acara Bedah Buku memperingati Hari Jadi Perpustakaan Ali Alatas ke 7 diselenggarakan Kementerian Luar Negeri RI. Jakarta; 28 November 2016.
44. **Wuryandari G.** Identitas nasional dan norma internasional sebagai pertimbangan politik Indonesia dalam merespons aksi dan jaringan terorisme global. Diskusi oleh BKD DPR RI. Jakarta; 16 Oktober 2016.
45. **Wuryandari G.** Persetujuan Paris dan strategi penurunan emisi karbon Indonesia. FGD oleh Pusat Penelitian Badan Keahlian Dewan (BKD)- DPR RI. Jakarta; 9 Mei 2016.
46. **Wuryandari G.** Prospek dan Tantang Indonesia dalam pencapaian target agenda pembangunan berkelanjutan 2030 (SDGs). Seminar dan *International Relations Fair* Prospek dan Tantangan Indonesia Dalam Mencapai Sustainable Development Goals (SDGs) oleh Kementerian Luar Negeri RI dan Universitas Andalas. Padang; 6 April 2016.

47. **Wuryandari G.** Tata kelola perbatasan di Malaysia dan Indonesia: Lesson learnt di kedua negara. Perbincangan Meja Bulat Tata Kelola Baru Perbatasan di Indonesia: Kesungguhan dan Harapan oleh School of International Studies Universitie Utara Malaysia (UUM). Sintok, Kedah; 26 April 2016.
48. **Wuryandari G.** Menelaah UU Nomor 43 Tahun 2008 tentang wilayah negara. Expert Meeting Tim Kerja RUU Wilayah Negara Komite I, DPD RI. Jakarta; 25 Januari 2016.
49. **Wuryandari G.** Peran DPD RI mendorong kerjasama internasional pemerintah daerah perbatasan. FGD oleh DPD-RI. Jakarta; 26 November 2015.
50. **Wuryandari G.** Kerja sama peningkatan konektivitas Indonesia, Australia dan Timor Leste melalui *People To People Links*. Roundtable Discussion Kementerian Luar Negeri RI. Yogyakarta; 1–3 Oktober 2015.
51. **Wuryandari G.** Membangun wilayah perbatasan: Revitalisasi kebijakan menghadapi globalisasi. Seminar Nasional dalam rangka Dies Natalis Universitas Tanjungpura. Pontianak; 27–28 Mei 2015.
52. **Wuryandari G.** Para diplomasi: Hubungan kerjasama ekonomi pemerintah daerah di Indonesia. FGD oleh Pusat Penelitian P3DI, Setjen DPR RI. Jakarta; 12 Mei 2015.
53. **Wuryandari G.** Pemajuan hubungan bilateral Indonesia – Malaysia melalui penguatan *People-To-People Contact*: Bidang sosial-budaya. FGD oleh Pusat Penelitian P3DI, Setjen DPR RI. Jakarta; 5 Juni 2015.
54. **Wuryandari G.** Manajemen data: Strategi dan teknis praktis storing dan organising. Workshop oleh the Aceh Institute dan the Asia Foundation. Banda Aceh; 28–29 Maret 2015.
55. **Wuryandari G.** Perspektif baru pengelolaan perbatasan. Dengar Pendapat oleh Komisi I Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia. Jakarta; 5 Februari 2015.

56. **Wuryandari G.** Ketahanan nasional Indonesia dalam konstelasi regional dan global. Dialog Kenegaraan oleh DPD-RI. Jakarta; 25 Juni 2014.
57. **Wuryandari G.** Prospek hubungan Indonesia-Cina di tengah konstelasi perubahan regional. Diskusi Terbatas oleh Deputi Analisis Badan Intelijen Negara (BIN). Jakarta; 13 Februari 2014.
58. **Wuryandari G.** Politik luar negeri Indonesia di tengah arus perubahan domestik dan global. Diskusi Publik diselenggarakan Komisi I DPR RI dan Indonesia Development Institute (INDI). Jakarta; 17 Desember 2013.
59. **Wuryandari G.** Pemberdayaan pulau-pulau kecil terluar dari aspek ekonomi dan politik. Makalah FGD Pemberdayaan Pulau-Pulau Kecil Terluar Guna Memelihara Stabilitas Pertahanan dan Keamanan Nasional Dalam Rangka Menjaga Kedaulatan NKRI. FGD oleh Lemhanas. Jakarta; 26 Juni 2013.
60. **Wuryandari G.** Penyelundupan narkoba di kawasan perbatasan Indonesia-Malaysia dan upaya penanganannya. FGD oleh P3DI, Setjen DPR RI. Jakarta; 10 Juni 2014.
61. **Wuryandari G.** Indonesia dan keamanan maritim kawasan. Diskusi Kerjasama ASEAN dalam Menghadapi Tantangan Keamanan Maritim diselenggarakan P3DI, Setjen DPR RI. Jakarta; 14 Mei 2014.
62. **Wuryandari G.** Politik luar negeri Indonesia: Tantangan dan arah kebijakan. FGD untuk Background Study Penyusunan RPJMN 2015–2019 Bidang Politik dan Komunikasi, khususnya Politik Luar Negeri Indonesia oleh Bappenas. Jakarta; 29 Agustus 2013.
63. **Wuryandari G.** Permasalahan pembangunan di perbatasan. Dengar Pendapat oleh Komisi I DPD-RI. Jakarta; 2 Februari 2013.
64. **Wuryandari G.** Pembangunan di wilayah perbatasan Miangas: Permasalahan dan solusi. Diskusi oleh Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP). 22 Januari 2013, Jakarta.
65. **Wuryandari G.** Perspektif baru tata kelola lintas perbatasan Indonesia-Malaysia: Sebuah keniscayaan. Lokakarya diselenggarakan oleh BNPP, JPP UGM dan College of Law Government

and International Studies Universiti Utara Malaysia (COLGIS UUM). Yogyakarta; 9–10 November 2012.

66. **Wuryandari G.** Keamanan dan pengembangan ekonomi di wilayah perbatasan Indonesia-Timor Leste di Provinsi Nusa Tenggara Timur. FGD oleh Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP). Kupang; 25–27 Juli 2012.
67. **Wuryandari G.** Lesson learned & best practices program-program pengembangan wilayah/daerah perbatasan. Forum Fasilitasi Penyusunan Panduan Dampak Pelaksanaan Pengembangan Wilayah Tertinggal (PWT) di Desa Tertinggal diselenggarakan Ditjen Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (PMD) Kementerian Dalam Negeri RI. Bogor; 9–11 Juli 2012.
68. **Wuryandari G.** Forum “Fasilitasi penyusunan panduan dampak pelaksanaan Pengembangan Wilayah Tertinggal (PWT) di Desa Tertinggal Tahun 2012”, diselenggarakan oleh Ditjen Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (PMD) Kementerian Dalam Negeri RI. Bogor; 9–11 Juli 2012
69. **Wuryandari G.** Konsep negara kepulauan sebagai landasan kebijakan pembangunan di wilayah bertipologi kepulauan di Indonesia. Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) Bale DPR RI dengan Dr. Rokhimin Dahuri, Dr. Ganewati Wuryandari, dan Prof. Dr. Nite Hulesselan dalam rangka mendapatkan masukan RUU tentang Daerah Kepulauan oleh DPR RI. Jakarta; 5 Oktober 2011.
70. **Wuryandari G.** Strategi bertahan hidup pada masyarakat perbatasan: Studi etnografi budaya di Pulau Sebatik, Kabupaten Nunukan, Kalimantan Timur. Pembahasan Rancangan Penelitian Insentif Ristek oleh PMB-LIPI. Jakarta; 15 Juni 2011.
71. **Wuryandari G.** Manajemen pengelolaan batas wilayah negara dan kawasan perbatasan darat secara terintegrasi dalam perspektif keamanan dan kesejahteraan. Seminar Nasional oleh Bappenas. Jakarta; 8 Desember 2010.

72. **Wuryandari G.** Memberdayakan pembangunan daerah tertinggal di Perbatasan. Diskusi Kompas diselenggarakan oleh Kompas dan Kementerian Pembangunan Daerah Tertinggal. Jakarta; 28 September 2010.
73. **Wuryandari G.** Nusa Tenggara Timur-Timor Leste: Permasalahan dan model-model pengelolaan. Seminar dan Workshop oleh Universitas Pembangunan Nasional “Veteran”. Yogyakarta; 18-19 November 2008.
74. **Wuryandari G.** Politik luar negeri Indonesia: Refleksi 10 Tahun dan proyeksi 5 Tahun. FGD oleh Kementerian Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional. Jakarta; 28 Juli 2008.
75. **Wuryandari G.** Isu Papua dalam hubungan Indonesia-Australia. Diskusi di Konsorsium Kebijakan Luar Negeri Indonesia oleh Universitas Paramadina. Jakarta; 18 Mei 2008.
76. **Wuryandari G.** Rasionalisme: Sebuah pendekatan dalam hubungan internasional. Seminar intern PPW-LIPI. Jakarta; 9 Agustus 1994.
77. **Wuryandari G.** Otonomi dan ketergantungan: Sebuah dilema. Seminar Intern PPW-LIPI. Jakarta; 28 Desember 1989.

Kuliah Tamu

78. **Wuryandari G.** Politik luar negeri Indonesia di era Jokowi. Mata kuliah “Politik Kontemporer dan Diplomasi Indonesia”, Progam Studi Hubungan Internasional, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Komunikasi Universitas Kristen Satya Wacana (UKSW). Salatiga; 8 Juli 2019.
79. **Wuryandari G.** Enhancing Indonesia-Australia connectivity: Education and research exchange. 2nd Year Graduate Students at the Department of Social Workers, Charles Darwin University. 26 June 2019.
80. **Wuryandari G.** Development in Southeast Asian countries. Graduate students at the Department of Social Sciences, Naresuan University, Phitsunulok. Thailand; 20 Mei 2018.

81. **Wuryandari G.** Pengelolaan perbatasan di Indonesia dari perspektif administrasi negara. Program Studi Magister Ilmu Administrasi FISIP, Universitas Lampung. Bandar Lampung; 18 November 2017.
82. **Wuryandari G.** Perkembangan diplomasi digital dalam hubungan internasional. Program Studi Ilmu Hubungan Internasional, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Muhammadiyah. Malang; 7 September 2017.

Tulisan di Surat Kabar

83. Memaknai kunjungan modi. Media Indonesia; 31 Mei 2018.
84. Menakar efek Trump di RI, kawasan dan global. Media Indonesia; 7 Januari 2017.
85. Pemilu Timor Leste, pertarungan masa depan. Media Indonesia; 22 Maret 2017.
86. Arti kemenangan Trump bagi Indonesia. Media Indonesia; 11 November 2016.
87. Expectation of Indonesia's renewed role in G20. The Jakarta Post; 6 September 2016.
88. G20 starts to promote inclusive development. China People Daily; 30 August 2016.
89. Mereinkarnasi konferensi Asia-Afrika. Penulis bersama Alami AN, Ramadhan MS. Media Indonesia; 20 April 2015.
90. Merajut hubungan RI-Timor Leste dengan perjanjian perbatasan. Kolom. Website P2P-LIPI; 12 Juni 2012.
91. Meneropong pemilu Australia. Koran Jakarta; 23 Agustus 2010.
92. Mencari solusi damai sengketa perbatasan di Timor. Kolom. Website P2P-LIPI; 21 Mei 2010.
93. Petaka di Laut Timor. Kolom. Website P2P-LIPI; 20 Mei 2010.
94. Arti penting kunjungan SBY ke Australia. Kolom. Website P2P-LIPI; 11 Maret 2010.

95. Harapan untuk Obama? Media Indonesia; 20 Januari 2009.
96. Hubungan baru AS-Indonesia. Koran Jakarta; 20 Februari 2009.
97. Papua: Kerikil hubungan Australia-Indonesia? Media Indonesia; 5 April 2006.
98. Resolusi PBB dan diplomasi Indonesia. Media Indonesia; 20 September 2000.
99. Timor Timur pasca referendum. Media Indonesia; 2 Oktober 1999.
100. Australia Agenda Tersembunyi. *Forum Keadilan*, No. 25 Tahun VIII, 1999.
101. Australia copes with yellow peril. The Jakarta Post; 29 May 1997.
102. Pemilu Australia: Buruh atau liberal?. Jawa Pos; 16 Februari 1996.
103. Pemilu Australia dan perubahan?. Suara Merdeka; 6 Maret 1996.
104. Perjanjian keamanan Indonesia-Australia: Kado akhir tahun. Media Indonesia; 26 Desember 1995.
105. Perjanjian keamanan Indonesia-Australia. Jawa Pos; 21 Desember 1995.
106. Makna penunjukan duta besar baru Indonesia di Australia. Suara Merdeka; 12 Desember 1995.
107. Dampak politik tes nuklir: Perancis keluar Pasifik Selatan. Media Indonesia; 16 September 1995.
108. Percobaan nuklir Perancis: Dilema negara-negara Pasifik Selatan. Suara Merdeka; 28 Agustus 1995.
109. Australia menjadi Republik?. Suara Merdeka; 12 Juni 1995.
110. Menanggapi konferensi Timor Timur. Republika; 26 Mei 1994.
111. Gaya baru politik Kangoroo. Republika; 23 Juni 1994.
112. Australia melihat ke Utara. Suara Merdeka; 30 Juni 1994.

113. Australia-Indonesia: Hubungan berayun. Suara Karya; 28 Juni 1994.
114. Negara berkembang: Demokrasi atau otoritarian? Suara Karya; 20 Juli 1994.
115. Australia dan isu Republik. Pelita; 29 April 1992.
116. PDI, massa mengambang dan pemilu. Pelita; 18 Mei 1991.
117. Peningkatan otonomi daerah. Pelita; 30 Maret 1991.
118. Partai Demokrasi Indonesia (PDI) dan pemilih muda. Pelita; 22 Maret 1991.
119. Perempuan Indonesia: Prospek penting Pemilu 1991. Suara Pembaharuan; 27 Januari 1991.
120. Partai Demokrasi Indonesia (PDI): Tantangan dan masalah. Pelita; 10 Januari 1991.
121. Prospek peran perempuan indonesian dalam politik. Suara Pembaharuan; 21 Desember 1989.

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

A. Data Pribadi

Nama : Dr. Ganewati Wuryandari, MA
Tempat/Tanggal Lahir : Magelang, 30 November 1964
Anak ke : Tujuh dari Enam Bersaudara
Nama Bapak Kandung : H.W. Poerwowasito
Nama Ibu Kandung : Hj.Marjatoen
Nama Suami : Bambang Triharyono
Jumlah Anak : 3 (tiga) orang
Nama Anak : 1. Maulana Permana Ajie
2. Saffira Annisa Bening
3. Nabila Annisa Harum
Nama Instansi : Pusat Riset Politik – BRIN
Judul Orasi : Politik Luar Negeri Era Reformasi:
Kebangkitan Indonesia sebagai Negara
Kekuatan Menengah dalam Percaturan
Regional dan Global
Bidang Kepakaran : Hubungan Internasional.
No. SK Pangkat Terakhir : 71/K Tahun 2014
No. SK Peneliti Utama : 3/M Tahun 2022

Buku ini tidak diperjualbelikan.

B. Pendidikan Formal

No.	Jenjang	Nama Sekolah/ PT	Tempat/Kota/ Negara	Tahun Lulus
1.	SD	SD Kemirirejo II	Magelang	1975
2.	SMP	SMP Negeri II Magelang	Magelang	1979
3.	SMA	SMA Negeri I Magelang	Magelang	1982
5.	S1	Universitas Gadjah Mada	Yogyakarta	1987
6.	S2	Monash University	Australia	1994
7.	S3	University of Western Australia	Australia	2006

C. Jabatan Struktural

No.	Tahun	Nama Jabatan/ Eselon	Nama Instansi
1.	2008–2014	Kepala Bidang Tata Operasional	Pusat Penelitian Politik-LIPI
2.	2014–2015	Kepala Bidang Pengelolaan dan Diseminasi Hasil Penelitian	Pusat Penelitian Politik-LIPI
3.	2016–2019	Kepala Pusat	Pusat Penelitian Sumber Daya Regional-LIPI
4.	2019–31 Agustus 2021	Kepala Pusat	Pusat Penelitian Kewilayahan-LIPI
5.	1 Sep–8 Nov 2021	Plt.Kepala Pusat	Pusat Riset Kewilayahan- BRIN

D. Jabatan Fungsional

No.	Jenjang Jabatan	TMT Jabatan
1.	Peneliti Madya (Gol. IV/b)	1 November 2008
2.	Peneliti Madya (Gol. IV/c)	1 April 2011
3.	Peneliti Utama (Gol. IV/d)	1 September 2012
4.	Peneliti Utama (Gol. IV/e)	1 November 2015

E. Karya Tulis Ilmiah

No.	Kualifikasi Penulis	Jumlah
1.	Penulis Tunggal	78
2.	Penulis bersama Penulis lainnya	24
	Total	102

No.	Kualifikasi Bahasa	Jumlah
1.	Karya Tulis dalam bahasa Inggris dan lainnya	12
2.	Karya Tulis dalam bahasa Indonesia	90
	Total	102

No.	Kualifikasi Publikasi	Jumlah
1.	Buku dan Bagian dari Buku	67
2.	Jurnal Internasional	4
3.	Jurnal Nasional	19
4.	Prosiding Internasional	3
5.	Naskah Kebijakan	9
	Total	102

F. Karya Publikasi Lainnya

No.	Kualifikasi Publikasi	Jumlah
1.	Makalah Internasional	25
2.	Makalah Nasional	52
3.	Kuliah Tamu	5
4.	Tulisan di Surat Kabar	39
	Total	121

G. Pengalaman Karier Terkait Kepakaran

Periode	Tempat/Program	Jabatan dan Keterangan
1985	Gadjah Mada University, Yogyakarta	Asisten peneliti Dr Affan Gaffar, MA
2000	International University of Japan (IUJ), Niigata, Japan	Research Fellow, Japan Society for the Promotion of Science (JSPS) Program
2003	Australian National University, Canberra	Visiting Fellow, Research School of Pacific and Asian Studies
2011–2012	IPSK-LIPI	Anggota Tim Perencanaan, Monitoring dan Evaluasi (PME) IPSK-LIPI
2012–2014	P2P-LIPI	Anggota Tim Perencanaan, Monitoring dan Evaluasi (PME) P2P-LIPI
2013	Dewan Perwakilan Daerah, Republik Indonesia (DPD-RI)	Anggota Tim Ahli/Pakar DPD-RI. Penyusunan Naskah Akademik dan Drafting Atas Rancangan Undang-Undang Tentang Pengelolaan di Daerah Perbatasan
2014	Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia	Panelis Pewawancara Substansi Seleksi Penerimaan Calon Pegawai Negeri Sipil
2016	Dewan Perwakilan Daerah, Republik Indonesia (DPD-RI)	Anggota Tim Ahli/Pakar DPD-RI. Penyusunan Naskah Akademik dan Rancangan Undang-Undang untuk Revisi Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2008 tentang Wilayah Negara

Buku ini tidak diperjualbelikan.

Periode	Tempat/Program	Jabatan dan Keterangan
2020–2023	ASEAN Regional Forum (ARF)	Eminent Person Group (EPG) perwakilan Pemerintah RI

H. Pembinaan Kader Ilmiah

No.	Universitas/PT Tempat Mengajar	Tahun Mengajar
1.	Universitas Indonesia	2007–2008
2.	Universitas Paramadina	2010–2012
3.	Universitas Pertahanan	2015–2016

No.	Universitas/PT Tempat Membimbing	Tahun Membimbing
1.	Universitas Indonesia	2007–2008
2.	Universitas Paramadina	2010–2012
3.	Universitas Indonesia	2019

I. Mitra Bestari Jurnal

No.	Jabatan	Jurnal	Tahun
1.	Mitra Bestari	Jurnal Politica	2011–2018
2.	Mitra Bestari	Jurnal Kajian	2015–sekarang
3.	Mitra Bestari	Jurnal Global Strategis	2015–2016
4.	Mitra Bestari	Jurnal Penelitian Politik	2016–sekarang
5.	Mitra Bestari	JlHI Universitas Katolik Parahyangan	2018–sekarang

J. Organisasi Profesi

No.	Jabatan	Nama Organisasi	Tahun
1.	Secretary General	International Federation of Social Science Organizations (IFSSO)	2019–sekarang
2.	Treasurer	International Federation of Social Science Organizations (IFSSO)	2017–2019

No.	Jabatan	Nama Organisasi	Tahun
3.	Anggota	Tim Penilai Peneliti Instansi (TP2I) LIPI	2016–2019
4.	Anggota	Tim Koordinasi Pemberian Izin Penelitian Asing	2016–2020
5.	Pengurus Pusat	Asosiasi Ilmu Politik Indonesia (AIPi)	1997–2002, 2011–2015, 2015–2019
6.	Pengurus Cabang	Himpunan Pelajar dan Peneliti Indonesia di Australia, Chapter Western Australia (HPPIA-WA)	2003–2004

K. Tanda Penghargaan

No.	Pejabat/Instansi yang Memberikan	Nama/Jenis Penghargaan	Tahun
1.	Presiden RI	Satyalancana Karya Satya X Th.	2000
2.	Presiden RI	Satyalancana Karya Satya XX Th.	2009
3.	LIPI Press	Buku Terbaik Terbitan LIPI Press Tahun 2015, judul Politik Luar Negeri dan Isu Keamanan Energi. Editor: Alami AN. Penulis: Alami AN, Wuryandari G , Sriyanto N, Yustiningrum E.	2015
4.	Presiden RI	Satyalancana Karya Satya XXX Th.	2019

Buku ini tidak diperjualbelikan.



Diterbitkan oleh:
Penerbit BRIN
Direktorat Repositori, Multimedia, dan Penerbitan Ilmiah
Gedung B.J Habibie, Jln. M.H. Thamrin No. 8,
Kb. Sirih, Kec. Menteng, Kota Jakarta Pusat,
Daerah Khusus Ibukota Jakarta 10340
Whatsapp: 0811-8612-369
E-mail: penerbit@brin.go.id
Website: penerbit.brin.go.id

DOI: 10.14203/press.519



ISBN 978-623-7425-55-7



Buku ini tidak diperjualbelikan.